

JUARA

LOMBA MENULIS
ARTIKEL & FEATURE
2016



Direktorat
dayaan

*Artikel
& Feature*



Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pemenang Lomba menulis

*Artikel
&
Feature*

2016

Artikel & Feature

Pengarah

Didik Suhardi

Penanggung Jawab

Asianto Sinambela

Ketua

Eka Nugrahini

Wakil Ketua

Andi Wibowo

Sekretaris

Hafid Suryadi

Anggota

Mangara Sitanggang

Aisyah

Anang Kusuma

Lani Fitriyana

Jumari

Septian

Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Jl Jenderal Sudirman,
Senayan
Jakarta
10270

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2016, Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Lomba artikel dan feature Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan dari Kegiatan ini adalah memberikan apresiasi kepada para penulis, baik dari media massa maupun guru / Orangtua siswa yang mencintai dunia kepenulisan dalam menuangkan ide dan gagasannya yang mempunyai kepedulian dalam dunia pendidikan dan kebudayaan.

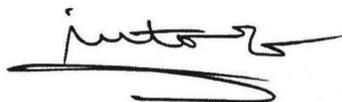
Lomba ini telah diikuti oleh lebih dari 1000 peserta semenjak dibuka pada tahun 2012 lalu. Peserta dari lomba inipun dibagi menjadi beberapa kategori yaitu wartawan, guru dan orangtua siswa, dipilih beberapa kategori tersebut agar dapat diikuti oleh para pemangku kepentingan pendidikan dan Kebudayaan.

Buku pemenang Lomba artikel dan feature Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2016 ini, disusun agar dapat digunakan sebagai informasi bagi para pembaca untuk mengetahui bagaimana karya – karya artikel dan feature yang telah layak memenangkan perlombaan ini. Setelah melalui mekanisme penilaian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kurun waktu tertentu, dan para pemenang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari nominasi yang telah ditentukan tim penilai.

Kami menyadari buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat terbuka untuk kritik dan saran. Akhir kata semoga buku kompilasi ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan pendidikan dan Kebudayaan dan juga pembaca pada umumnya.

Terima kasih

Kepala Biro Komunikasi
dan Layanan Masyarakat



Asianto Sinambela

Daftar Isi

Artikel

| | |
|-------------------------|---------|
| Juara I lomba Artikel | 2 - 9 |
| Juara II lomba Artikel | 10 - 15 |
| Juara II lomba Artikel | 16 - 21 |
| Juara III lomba Artikel | 22 - 29 |
| Juara III lomba Artikel | 30 - 35 |
| Juara III lomba Artikel | 36 - 41 |

Feature

| | |
|-------------------------|----------|
| Juara I lomba Feature | 44 - 63 |
| Juara II lomba Feature | 64 - 71 |
| Juara II lomba Feature | 72 - 81 |
| Juara III lomba Feature | 82 - 89 |
| Juara III lomba Feature | 90 - 95 |
| Juara III lomba Feature | 96 - 101 |

*"Orang boleh pandai setinggi langit,
tapi selama ia tak menulis,
ia akan hilang di dalam masyarakat
dan dari sejarah"*

Pramoedya Ananta Toer

Guara Lomba Artikel 2016

Tema
Keterlibatan publik dalam aktivitas
Pendidikan dan Kebudayaan

JUARA

I

Wahyu Kuncoro
Orangtua Siswa
Surabaya, Jawa Timur

PENGUATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENDIDIKAN

Penyelenggara Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk siswa SMA/SMK yang baru saja selesai digelar sempat menyembulkan aroma yang kurang sedap. Salah satunya adalah mencuatnya kasus dugaan terjadinya praktik pungutan liar (pungli) dalam penyelenggaraan UNBK di Surabaya kemarin. Praktik yang kurang lebih sama juga terjadi di berbagai daerah.

Mencermati apa yang terjadi khususnya terkait dengan modus praktik pungli sesungguhnya tidak ada yang baru. Kasus tersebut hemat penulis terjadi akibat 'jebakan' perencanaan anggaran yang tidak memadai. Sebagaimana penyelenggaraan ujian-ujian sekolah, hampir pasti selalu ada kebutuhan anggaran yang secara formal tidak teralokasikan dengan baik. Sehingga membutuhkan langkah-langkah 'khusus' untuk menanggulangnya

Kebiasaan 'urunan' atau penggalangan dana secara 'ilegal' acap menjadi solusi untuk mengatasi kondisi tersebut. Budaya inilah yang acap melahirkan jebakan pungli. Manajemen keuangan yang berdasar rasa 'saling mengerti dan memahami' itu terjadi karena SDM di sekolah relatif tidak memiliki keahlian dan kompetensi untuk mengelola dan mengatur keuangan secara benar sesuai standar akuntansi yang ditentukan. Akibatnya, langkah-langkah yang mungkin saja tidak 'berniat jahat' tersebut akan menjadi persoalan serius manakala ada pihak yang keberatan dan kemudian mempersoalkan. Inilah masalah klasik yang akan selalu berulang akibat keidakberesan dalam penyusunan dan per-

encanaan penganggaran.

Persoalan penarikan dana pendidikan juga akan kembali menjadi topik perdebatan yang seksi saat masa-masa pendaftaran siswa sekolah yang sebentar lagi akan berlangsung. Biasanya saat pendaftaran sekolah akan muncul pula pro kontra soal pungutan sekolah dan besarnya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang seringkali dirasakan memberatkan masyarakat.

Wacana pendidikan yang berkembang di masyarakat sering membingungkan dan kontraproduktif. Di satu sisi selalu didengungkan tentang pendidikan gratis dan penambahan porsi anggaran pendidikan hingga mendekati 20 persen. Dalam konteks itu, logikanya segala bentuk sumbangan atau pungutan seharusnya tidak diadakan karena buat apa anggaran sebesar itu. Bukankah sudah ada dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), dana rehabilitasi sekolah dan beasiswa. Benar semua itu sudah ada namun dalam kenyataan masih kurang memadai. Karena kebutuhan pemerataan pendidikan dan kondisi prasarana yang serba terbatas.

Di sisi lain tuntutan pengembangan institusi tak bisa ditunda-tunda. Orang tua juga sangat mendambakan peningkatan kualitas pendidikan. Apa yang disediakan oleh anggaran pemerintah belum apa-apa. Apalagi kondisi setiap sekolah berbeda-beda. Itulah sebabnya dalam relitas kita tak bisa menghindari apa yang namanya pungutan sekolah, SPI dan sebagainya. Para orangtua murid pun bisa mengerti setelah dijelaskan keadaan sebenarnya. Maka kalau yang seperti itu dianggap bagian dari komersialisasi pendidikan, pemerintahlah yang seharusnya bertanggung jawab.

Partisipasi Publik

Secara obyektif pula kita sulit meniadakan program kemitraan dalam menopang pembiayaan pendidikan. Alasannya jelas sekolah membutuhkan dukungan stakeholder bagi pengembangan institusi sementara pemerintah belum mampu memenuhi berbagai kebutuhan yang ada. Kalau pun harus ditunggu maka ada yang dikorbankan yakni pening-

katan kualitas termasuk pendukungnya yakni kesejahteraan guru dan karyawan.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar sesungguhnya sudah memberi rambu-rambu dalam memandu sekolah saat melakukan penggalangan dana untuk pendidikan. Dalam pasal 1 ayat 2 menjelaskan, “pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/ atau barang/ jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutan ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.” Sedangkan sumbangan, (pasal 1 ayat 3) adalah “penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.”

Dana sumbangan yang didapat dari masyarakat betul-betul dipakai untuk menutupi kekurangan biaya operasional. Untuk mencari sumbangan dari masyarakat, selain memiliki rencana kerja tahunan sekolah juga wajib membahasnya bersama dengan komite sekolah. Rencana kerja sekolah dan anggaran yang dibutuhkan juga harus diketahui dan disetujui oleh pejabat berwenang (dinas pendidikan). Dan yang terpenting, bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan melakukan pungutan harus mencerminkan prinsip keadilan.

Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana pungutan maupun sumbangan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orangtua/wali peserta didik, komite sekolah dan penyelenggaraan satuan pendidikan dasar.

Kita berpacu dengan negara lain dalam peningkatan kualitas. Meng

semua berharap tak ada ligo pungutan yang memberatkan. Juga mestinya tak ada lagi sekolah favorit atau kurang favorit. Tetapi semua itu barulah sebatas angan-angan karena kondisi di lapangan jauh berbeda. Kita perlu berhati-hati menyebut kata komersialisasi pendidikan. Namun, yang penting ada upaya keras untuk pemerataan di samping terus dilakukan pola subsidi silang sehingga potensi siswa cerdas terakomodasikan.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 (1) menegaskan Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Dalam pasal 47 (2) mengatur Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Artinya, sesungguhnya tidak ada yang salah kalau masyarakat ikut terlibat dalam pembiayaan pendidikan. Namun demikian, harus kita akui bahwa persoalan melibatkan publik untuk ikut serta membantu penyelenggaraan pendidikan bukan persoalan yang mudah untuk dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang No 20/2003, yang disebut masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia (WNI) non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Mereka berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

Revitalisasi Komite Sekolah

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 199 (1) menegaskan Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, Dewan pendidikan dan komite sekolah/ madrasah.

Dalam konteks sekolah, maka peran komite sekolah menjadi patut di-revitalisasi. Tugas Komite sekolah yang utama adalah untuk melakukan pertimbangan dan pengawasan terhadap mutu dan pelayanan sekolah sesuai dengan Pasal 56 Ayat 3 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang berbunyi “Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri, yang dibentuk dan bereperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.”

Komite sekolah bukan hanya kumpulan wali murid yang dihadirkan hanya untuk menggalang sumbangan saja, tetapi juga untuk memikirkan dan merancang agar satuan pendidikan (sekolah, red) bisa semakin maju dan berkualitas pendidikannya. Peran aktif komite sekolah diharapkan akan membuat Kepala Sekolah berikut para gurunya lebih fokus dalam melaksanakan tugas pembelajaran sebagai pendidik dan tidak direpotkan oleh persoalan sumbangan dan pendanaan sekolah lagi. Dalam upaya untuk merevitalisasi komite sekolah bisa diawali dari proses pembentukannya.

Peraturan Pemerintah 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mengamanahkan bahwa pembentukan komite sekolah tidak bisa sembarangan. Dalam pasal 197 misalnya mengatur bahwa anggota komite sekolah/ madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur . Orangtua wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen); tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen). Ketentuan ini mengisyaratkan agar komite sekolah bisa berdaya karena bukan saja terdiri dari para wali murid tetapi juga tokoh masyarakat dan pakar pendidikan.

Dalam PP 17/2010 secara tegas juga mengatur tentang kegiatan yang tidak boleh dilakukan Komite Sekolah seperti menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam di satuan pendidikan; memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik

atau orangtua/walinya dan sebagainya. Inilah nampaknya yang belum banyak diketahui oleh masyarakat betapa pentingnya keberadaan komite sekolah. Pendidikan itu sebuah gerakan sehingga jelas membutuhkan keterlibatan publik.

Melibatkan partisipasi publik dalam pendidikan salah satunya melalui wadah komite sekolah dalam proses pengambilan kebijakan akan membuat masyarakat merasa ikut bertanggung jawab dalam mengurus dan mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi terkait Pendidikan. Keterlibatan Publik diharapkan bisa membantu pemerintah membawa perubahan dalam dunia pendidikan.

JUARA

II

Liza Yuvita Sikku
Orangtua Siswa
Kebumen, Jawa Tengah

Kiblat yang Tertukar

(Perlunya Peranan Publik dalam Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu)

Menjadi berilmu dan bermoral adalah hak dan kewajiban setiap manusia. Ilmu dan moral adalah sepasang kaki. Harus sama tinggi, agar tidak timpang. Masalahnya sekarang, begitu banyak hal yang membuat kita tidak kunjung cerdas dan bermoral. Salah satunya adalah akibat stigma yang sudah didoktrinkan turun-temurun dari orangtua ke anak-cucu. Sebagai orang awam, dan juga seorang ibu, saya pribadi cukup waswas tentang maraknya perilaku amoral yang menjangkiti sebagian besar remaja Indonesia. Pun demikian, masyarakat yang sebagian besar juga ikut waswas hanya sebatas prihatin di atas kertas, bagai angin lalu. Prihatin yang sebatas lisan, namun minim introspeksi dan minim motivasi diri untuk lebih berilmu dan bermoral.

Siapa dan apa sebenarnya penyebabnya, jarang sekali yang mau menggali. Menyalahkan media sosial dan televisi adalah hal yang paling sering dilakukan, sebab menyalahkan pihak lain adalah hal paling mudah dan murah. Sekalipun, kedua hal tersebut juga mengambil andil cukup besar dalam membentuk karakter seseorang.

Sadar atau tidak, kita hidup di tengah stigma yang mengotak-kotakkan sesuatu, hingga akhirnya muncul kasta-kasta yang tidak pada tempatnya, terbentuk sedemikian rupa lalu menjadi budaya dalam berpikir. Salah satu pengastakan yang tidak pada tempatnya adalah mengastakan sebuah profesi sebagai tolak ukur sebuah kesuksesan seorang anak, di atas bagaimana ia menjalani profesi itu. Ingat-ingatlah pada saat kita duduk di bangku TK. Ketika seorang guru bertanya, "Kalau sudah besar mau jadi apa?", maka dapat dipastikan mayoritas murid-muridnya me-

milih dokter, insinyur, guru, PNS, dan polisi, sebagai cita-citanya. Jarang sekali ada yang ingin menjadi seorang petani, nelayan, atau petugas kebersihan. Ajaran siapa?

Bangsa Indonesia yang sejak dulu terkenal dengan keluhuran peradabannya kini mulai harus berkaca lebih sering. Ketika zaman kerajaan Hindu-Budha berjaya, kasta tertinggi berada di tangan para brahmana. Brahmana adalah orang-orang yang luhur secara ilmu dan moral, namun sangat tidak mementingkan tentang harta duniawi. Kaum ini, sangat dihormati oleh raja sekalipun. Sayangnya, warisan budaya luhur tersebut, kini dianggap kuno, tidak up to date, dan yang lebih kejam: sudah tidak zaman.

Ketika zaman kerajaan Islam berkuasa di Nusantara, ajaran akhlakul karimah pun dikedepankan dalam hal apapun. Akhlak adalah yang utama dan terutama. Kenyataannya, saat ini kiblat masyarakat telah berubah. Zaman telah mendoktrin kiblat pola pikir masyarakat pada motto "Keuangan yang Maha Kuasa." Perlahan tapi pasti, motto hedonis ini menggerus keluhuran budaya nusantara. Orang-orang berbondong-bondong menggunakan berbagai cara agar bisa kaya agar dihormati.

Memang harus kita akui, mayoritas manusia ingin menjadi pusat perhatian, dipuji, dan diinginkan. Namun, menjadikan uang sebuah tolak ukur kesuksesan demi mendapatkan penghormatan dari khalayak, adalah sesuatu yang harus dipikir ulang.

Jemari tidak semua sama tinggi, namun memiliki fungsinya masing-masing. Sama seperti profesi, tidak semua mendapatkan gaji tinggi, namun perannya penting bagi kehidupan sehari-hari. Gaji seorang dokter tentu tidak sama dengan nelayan. Namun, seorang nelayan adalah pengasup kebutuhan protein, selayaknya petani mengasup makanan pokok bangsa ini. Nelayan dan petani adalah ujung tombak terwujudnya salah satu poin nawacita: swasembada pangan.

Mendoktrin para tunas bangsa dengan kiblat yang salah, menentukan mindsetnya di kemudian hari. Kesalahan dalam memahami sesuatu,

berasal dari guru yang berpaham salah. Guru dalam hal ini tidak sebatas pada profesi, namun pada kegiatan belajar-mengajar. Kualitas pendidikan dalam keluarga dalam hal ini adalah ujung tombak dalam pelunasan salah satu janji kemerdekaan: mencerdaskan kehidupan bangsa.

Stigma yang akhirnya bertransformasi menjadi mindset, melibas tanpa ampun siapa pun yang tidak kunjung mau memperbaharui isi kepalanya dengan ilmu. Gajah yang besar, tak akan mampu meloloskan diri dari rantai kecil yang membelit kakinya. Sebab, ketika kecil ia telah mendoktrin dirinya bahwa ia tidak bisa meloloskan diri dari rantai yang mengikat kakinya setelah berusaha berkali-kali untuk lari. Dan pemikiran itu terbawa hingga ia dewasa, walaupun sebenarnya sangat mudah bagi gajah untuk lolos.

Kiblat pola pikir yang salah selanjutnya bersarang di mayoritas kepala wali murid. Kebanyakan dari orang awam, menganggap siswa jago matematika lebih pintar dari siswa yang jago olahraga. Padahal, jika saja seseorang mau menggali ilmu lebih dalam lagi, stigma seperti ini tidak akan terbentuk. Semua insan adalah cahaya, jika tepat pada tempatnya.

Howard Gardner, memetakan kecerdasan manusia menjadi delapan jenis yang meliputi kecerdasan linguistik, logika, musikal, nature, intrapersonal, kinetik, spasial, dan juga interpersonal. Jadi, sebenarnya tidak ada manusia yang bodoh, pola pikir kitalah yang membuat stigma-stigma tersebut. Zaman terlalu terobsesi mengejar kompetensi, hingga abai pada esensi.

Dalam hal ini, media sosial dan televisi sebagai corong modernisasi juga ikut andil. Saya sebenarnya mau protes terhadap sinetron remaja yang menggambarkan seorang kutu buku dengan sosok kuper dengan kacamata tebal dan sering gugup. Saya berteman dengan beberapa penulis terkenal, dan mayoritas adalah orang yang tidak kuper apalagi gugupan. Seorang penulis hebat tentu sosok yang gila baca. Sialnya,

peran utama mayoritas digambarkan dengan sosok yang *too good to be true*, dengan segala kenakalan, fashion style, dan kendaraan yang menyedot perhatian. Otomatis, semua mata terpikat pada tokoh utama dan mulai menjadikan sosok tersebut sebagai trendsetter.

Negara dalam hal ini sudah berusaha keras dengan berbagai cara agar masyarakat bisa bersekolah tinggi melalui program beasiswa penuh maupun bantuan dana, mengubah cara berpikir dan mau menggali budaya lokal melalui lomba-lomba dan penyuluhan, juga membuat pagelaran dan pameran budaya. Namun, untuk memajukan sebuah bangsa, diperlukan kesadaran pribadi untuk mau menjadi seseorang yang berilmu, lalu sadar pula akan kewajiban mendidik dengan paham yang benar.

Radikalisme adalah bukti nyata kesalahan pola pikir yang membudaya dalam kepala seorang ekstrimis. Stigma yang salah telah membentuk kubu-kubu yang tidak sesuai tempatnya, untuk kemudian saling berbenturan. Di negara bhineka ini, radikalisme harus ditumpas! Tidak ada toleransi kepada perusak bangsa dengan alasan apapun! Dalam hal ini, publik wajib ikut dalam upaya pencerdasan diri dan melestarikan budaya, agar mampu mengerti bahwa era yang sedang berlangsung adalah era penjajahan melalui mindset yang terus menerus dicorongkan lewat media.

Kembali lagi, menjadi berilmu dan bermoral bukan lagi soal bisa atau tidak bisa, melainkan mau atau tidak mau.

Jadi, lebih pintar mana, B.J. Habibie atau Didi Kempot?

JUARA

II

Derry Nodyanto

Guru

SMAN 1 Pemali Bangka

Bangka Belitung

PUBLIK DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Seorang tokoh bernama Huntington pernah mengemukakan bahwa “pertentangan manusia yang akan datang merupakan pertentangan budaya”. Asumsi tersebut tidak dapat kita remehkan mengingat manusia sebagai bagian dari kebudayaan memiliki potensi terjadi gesekan-gesekan antarkelompok yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu diperlukan upaya manusia melakukan pengendalian sosial dengan kecerdasan yang dimiliki (baik kecerdasan spritual, rasional, emosional, dan sosial) serta memantapkan kembali penguatan jati diri dengan penanaman atribut yang sama sebagai warga negara guna menekan terjadinya konflik horizontal dan hal-hal merugikan lainnya.

Betapa tidak, kemajemukan sudah barang tentu dihadapkan dengan berbagai tantangan baik yang bersifat lokal maupun global. Kemajemukan masyarakat yang ditandai dengan perbedaan kultural, religi, adat istiadat dan lain sebagainya merupakan kondisi rawan yang apabila tidak disikapi dengan bijak terutama yang menyangkut SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) dapat merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Pergesekan yang mengatasnamakan primordialisme, etnosentrisme, dan lain-lain termasuk dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak didukung dengan pemikiran yang matang tidak jarang membuahkan tindakan bersifat disharmoni bahkan berujung pada tindakan anarkis. Contoh kecil saja, munculnya tindak kekerasan antar remaja atau kelompok tertentu

terkadang dipicu oleh hal sederhana semisal umpatan di media sosial yang berujung kepada perkelahian karena tidak dibingkai oleh nilai-nilai etika dalam mengaktualisasikan diri.

Dengan demikian pertentangan budaya adalah hal yang tidak dapat disepelkan dan karena itu budaya memiliki peranan yang sangat besar di dalam menentukan arah kerjasama maupun konflik antar sesama manusia. Sebagai tindak lanjut maka nilai-nilai budaya harus dipandang sebagai tolok ukur kehidupan sekarang maupun masa akan datang dari berbagai proses kehidupan yang telah terlewati. Namun perlu diingat, nilai-nilai budaya yang menjadi tolok ukur atau apapun namanya yang berkaitan dengan acuan/patokan menjadi tidak berarti apabila semua tidak didukung oleh kesadaran individu dalam memahami perbedaan. Sebab memahami perbedaan merupakan salah satu nilai baik dalam mencegah disharmoni dan membentuk komunitas majemuk dalam wujud keutuhan.

Membangun komunitas yang majemuk haruslah berlandaskan pada falsafah-falsafah kesamaan sebagaimana telah diwariskan dan ditunjukkan oleh para pendiri bangsa (*The Founding Father*) yang berjuang membentuk bangsa dengan tidak mengedepankan keegoisan maupun pengkotakkan berdasarkan kesukuan. *The Founding Father* membentuk bangsa ini atas dasar persamaan, yakni persamaan latar belakang sejarah sebagai bangsa yang terjajah, perasaan senasib sepenanggungan sehingga makin mengukuhkan tekad untuk bersatu dalam wadah bernama Indonesia

Oleh karena itu apabila masa depan bangsa ini tanpa dihiasi penyemaian dan pemahaman yang benar terhadap fakta keanekaragaman budaya termasuk agama, merupakan hal menakutkan sekaligus goncangan bagi keutuhan bangsa. Dengan demikian diperlukan upaya sistemik untuk mendidik keanekaragaman budaya dan agama kepada segenap lapisan masyarakat, terutama para siswa di sekolah. Ketika berbicara satuan pendidikan, peran guru sebagai pengembang kurikulum melalui empat kompetensi yang dimiliki terutama kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial untuk menuangkan proses dan gera-

kan (bisa dilakukan melalui hidden curriculum) dalam menghargai dan menghormati antar kelompok, menghargai identitas budaya dalam kemajemukan, prinsip toleransi, termasuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lebih lanjut dalam kehidupan bermasyarakat, manusia-manusia Indonesia harus menyadari dan menerima bahwa kita dianugerahkan sebagai bangsa yang majemuk. Kemajemukan tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita akui, kita terima dan dihormati.

Zuriah (2010) mengatakan bahwa diperlukan satu sistem pendidikan yang bersifat multikultural yang menjamin tumbuh kembangnya nilai multikultural berbasis kearifan lokal dan dapat berperan dalam mengantarkan bangsa Indonesia ke dalam tatanan cita ideal masyarakat multikultural yang demokratis dan berkeadaban, dengan mengakomodir dan mengharmonisasikan nilai-nilai etnisitas dan kosmopolitanisme yang berkembang di masyarakat. Diperkuat oleh Baedowi (2015) dengan pendidikan multikultural, aspek-aspek seperti sikap yang terbuka, inklusif, lebih mengedepankan dialog, saling memahami perbedaan ideologi dan nilai di tengah masyarakat yang beragam (secara budaya dan agama), diakui sebagai modal penting bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat, dimana semua perbedaan dan keragaman dalam masyarakat dilihat sebagai sumber kekuatan untuk pemberdayaan masyarakat.

Penanaman pentingnya keanekaragaman budaya termasuk agama melalui pendidikan multikultural sebagaimana yang disebutkan di atas, tentu tidak sekedar berhenti pada level wacana yang tak berujung tanpa berlanjut ke level praksis. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemendikbud, Sawangan, Depok mengungkapkan bahwa penanganan ekosistem pendidikan dan kebudayaan memerlukan pelibatan publik (bukan hanya LSM, atau organisasi tertentu tetapi publik secara luas, yakni orang tua, sekolah dan masyarakat) dengan harapan nuansa perubahan yang diharapkan bukan hanya kajian simbolis atau konseptual semata.

Artinya saat ini sudah saatnya kita bertransformasi menjadi manusia-manusia dengan tipe pemikir sekaligus pekerja, bukan memisahkan tipe pemikir atau tipe pekerja semata. Sebagaimana ungkapan orang bijak yang mengatakan bahwa nasib kita bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan lebih dulu melainkan tergantung pada pilihan kita pada saat ini, yakni pilihan untuk tetap memelihara wujud kebudayaan dan peradaban sekaligus mempertahankan keutuhan bangsa di tengah masyarakat yang majemuk.

Pada akhirnya salah satu poin dari tujuh poin Kapsul Waktu (berisikan rangkuman Impian Indonesia 2015-2085) yang ditanam oleh Presiden Jokowi di Lapangan Hasanap Sai Kabupaten Merauke, Papua, Tanggal 30 Desember 2015 yang lalu, yakni “Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika” dapat terwujud dan menjadi tugas bersama untuk mewujudkan impian tersebut. Semoga****

JUARA

III

Kurniati

Guru SMKN 1 Sunggailiat

Bangka Belitung

Peran Publik sebagai Mitra Mendidik

Seiring berkembang zaman, berkembang pula ekspektasi masyarakat terhadap pendidikan. Harapan pada pendidikan tidak sekadar mencerdaskan anak bangsa, pendidikan juga harus mampu membangun jati diri, membudayakan pekerti. Sebagaimana peran pendidikan sebagai upaya pewarisan nilai-nilai luhur suatu bangsa kepada generasi selanjutnya, dengan kata lain melestarikan budayanya. Dan pepatah Latin kuno *tempus mutatur, et nos mutamur in illud*; yang bermakna waktu berubah dan kita ikut berubah, harus kita sikapi secara bijak, berubah untuk kebaikan, pendidikan dikembangkan untuk kebutuhan kita sendiri.

Salah satu masalah utama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan adalah meredupnya semangat berbudaya alih-alih memengaruhi pendidikan yang tergerus oleh masalah politik dan berbau semantik. Maka agenda penting yang menyangkut dengan dunia pendidikan yang utama adalah bahwa pendidikan harus dapat membangun karakter dan jati diri (Purwati dalam Cahyani, 2011:12).

Para pendidik memerlukan mitra untuk mengembangkan pengetahuan di bidang budaya. Tugas dan tanggung jawab membangun budaya pada generasi penerus tidak hanya dibebankan pada pundak pendidik. Salah satu bentuk membangun budaya berpikir yang baik, selain kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, tentu diperlukan adanya partisipa-

si masyarakat. Kita telah mengenal pendidikan formal, informal, dan nonformal yang kesemuanya berkaitan dengan perkembangan pendidikan siswa di masyarakat. Karena pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat, maka pendidikan harus benar-benar disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang melibatkan masyarakat.

Jika kita, (pemerintah daerah khususnya) dan masyarakat, sama sekali tidak mau melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung dalam membina dan memfasilitasi perlestarian, perkembangan budaya daerah, bagaimana seni budaya akan menjadi tuan rumah? Setidaknya ranah kebijakan pemerintah bersinergi dan bergaris lurus dengan tujuan pendidikan.

Derasnya arus globalisasi harus kita waspadai jangan sampai menggerus budaya, khususnya budaya lokal yang memuat banyak ajaran dan nilai. Budaya luar kini kian eksis, budaya lokal surut makna. Sebenamya dalam memaknai budaya, kita dapat memahami, kemudian mengaplikasikannya dalam beberapa bentuk, yaitu; secara deskriptif, historis, normatif, psikologis, struktural, dan genetis. Misalnya; melalui definisi deskriptif; memahami budaya sebagai totalitas komprehensif yang menyusun keseluruhan hidup sosial sekaligus menunjukkan bidang yang membentuk budaya.

Adanya jenis pemahaman budaya tersebut berkaitan dalam kehidupan kita, sebab puluhan juta generasi penerus sedang bemaung di bawah cangkang dunia global yang makin menusuk dan akan merusakjiwa-jiwa harapan bangsa bila kita tidak dapat menyaring hal-hal yang negatif. Melalui keterlibatan siswa pada kegiatan masyarakat dalam pemahaman dan kesadaran akan budaya beserta bahasanya, akan menjadikan pembelajaran bagi siswa. Secara tidak langsung bersama masyarakat, siswa dalam wadah

pendidikan turut memaknai kembali budayanya, dan dapat mengembangkan bahasa, bukan sekadar “melihat”. Nyanyian rakyat begitu pula lagu-lagu daerah, misalnya, merupakan budaya bentuk

seni tradisi yang menggunakan bahasa sebagai ciri daerah, sastra lisan yang bergantung pada penutur, dan berisi tentang ajaran dan hikmah. Fenomena saat ini, anak-anak senang dengan budaya asing, ini bukti bahwa budaya yang sedang membesarkan mereka adalah budaya kita yang terkontaminasi dengan budaya “asing tanpa disaring”. Akankah kita hanya mendesah?

Tentu kita berharap eksistensi budaya tetap terjaga, maka kita perlu berkomitmen, melakukan pemertahanan budaya daerah. Usaha pemertahanan tersebut salah satunya adalah dengan menjadikan budaya daerah itu sebagai mata pelajaran muatan lokal (mulok) di sekolah.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat, aktivitas dalam bentuk kecil pun berperan penting untuk mengangkat dan melestarikan budaya, menjadi bagian integratif. Di antaranya, pemerintah dan masyarakat yang berkompeten satu kata dalam pemuatan materi mata pelajaran mulok di sekolah, mengadakan festival budaya antarsekolah, atau menggagas sekolah berbudaya.

Bagaimanakah hal pemertahanan ini dapat terlaksana? Para seniman berkarya, para budayawan mencipta, dan para siswa belajar dan membaca. Jika tak ada perpanjangan tangan dan tak mendapat perhatian pihak terkait tentu karya yang ada tak akan tersiarkan dengan baik. Jika begitu, para pelajar pun menjadi orang asing dengan budaya sendiri. Lalu, siapa yang akan kenai dan kemudian sayang?

Maka ketika beberapa waktu yang lalu Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Program 1 Sungailiat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan acara budaya dengan tajuk “Semarak Senandung Irama Urang Kite”, dan Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan pekan sastra, masyarakat secara kolektif mengadakan pemantapan agenda budaya, menjadikan suatu bentuk peristiwa yang sangat bermakna. Hal ini telah mengetengahkan karakter budaya daerah (bangsa).

Rangkaian program RRI yang melibatkan siswa beserta atensi masyarakat telah mengangkat budaya Bangka Belitung. Penyelenggaraan gelar seni teater (daerah) bertajuk “Menyibak Geliat Sastra Bangka Belitung, Mengobarkan Hasrat Berkarya” cukup memerikan pencerahan kepada siswa serta masyarakat yang hadir waktu itu.

Sebagai tenaga pendidik yang awam terhadap geliat seni budaya di tanah ini, upaya RRI Sungailiat, Kantor Bahasa, dan komunitas budaya, sebagai corong yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk bergema, sangat mengharapkan program seperti ini terus diagendakan. Kegiatan seperti ini dapat berkontribusi bagi keluasan pandangan siswa tentang budaya, kreativitas, dan semangat untuk berbuat. Misalnya, dialog padat memuat materi tampilan budaya, mengundang antusias siswa untuk bertanya.

Acara dialog ini setidaknya berupaya menyelidik fenomena kehidupan seni budaya daerah, bagaimana upaya dan dilematika yang ada.

Sementara itu, temu Sastra Lisan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi acara berkumpulnya para praktisi sastra lisan dan akademisi juga membawa riak yang cukup penting. Kegiatan ini tidak sekadar kumpul-kumpul. Ketika para praktisi tiap kabupaten menyampaikan “kebolehan” peserta dari kabupaten lain mendapatkan pencerahan, dan penegasan tentang benang merah budaya yang berkaitan dengan sastra lisan yang ada. Walau jenis dan ragam dalam kelisanan hampir serupa, akan tetapi terdapat corak yang dapat membedakannya. Kita dapat saja berpijak pada bumi yang sama, tetapi cerita dan bahasa yang mengusung dan mengantarkan kita hingga bersama itu memiliki warna atau varian yang beragam. Dan inilah ciri khas sastra lisan itu. Inilah pembelajaran yang menambah wawasan siswa akan budayanya.

Setidaknya dari pertemuan itu para penggiat dan penikmat sastra lisan (khusus para pelajar) telah menemukan ragam sastra lisan Kepulauan Bangka Belitung, bahwa sastra lisan yang dimiliki terikat pada

lokasi, masa tertentu, dan partisipasi masyarakat (komunitas) dengan pengenalan kelompok pada umumnya. Dengan kata lain, sastra lisan ada karena adanya pendukung kelisanan tersebut baik secara praktik maupun teoretik. Temu para praktisi yang merupakan ajang berkumpul mereka yang aktif bergerak di sana, menyimpulkan kehidupan sastra lisan yang ada di kepulauan Bangka Belitung meliputi pantun, talibun, bebulak, begalor, syair, seloka, gurindam, karmina, mitos (cerita rakyat/folklore, legenda) pantangan, mantra, petatah-petitih, meratap (nerataq, betase), dendang, dan hikayat ("Temu Sastra Lisan se-Provinsi Kep.Bangka Belitung," Pangkalpinang, 10/10/13).

Agenda pada kegiatan seperti ini dapat memberikan pemahaman pada pelestarian dan pengembangan bahasa bahwa:

1. Bersastra melalui bahasa yang lahir dari mediasi ini adalah bahasa yang bersifat generatif dan transformatif. Dikatakan generatif karena dengan mediasi bahasa itu berkaitan dengan kreativitas pemakai bahasa dalam mencipta kata.
2. Secara transformatif karena bahasa itu bersinggungan erat dengan hal semantis, bahwa bahasa yang dihasilkan akan bermakna jika terdapat sinergi dari perjumpaan atau mediasi pelaku sastra dengan yang lain.
3. Demikian pula, telah melestarikan budaya dan bahasanya.

Orang bijak mengatakan, tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya dapat harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Bila tradisi dihilangkan maka ada kemungkinan suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga. Dengan demikian hal penting yang dapat diangkat dari sinergi masyarakat terhadap pendidikan berbasis budaya, di antaranya; kehidupan bermasyarakat sebagai sistem sosial dan sistem budaya menguatkan kebudayaan dan masyarakat, termasuk masalah sosial budaya.

Dengan kegiatan ini kita setidaknya menjaga agar kebudayaan tersebut tetap lestari karena dalam setiap bentuk budaya mengandung pelajaran yang sangat berarti bagi generasi muda dalam menghadapi kehidupan. Keunggulan budaya menjadi pengetahuan mendasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku.

Semakin besar bentuk sinergitas itu, akan semakin membantu program lembaga pendidikan yang terbatas sumber daya. Peran yang dimainkan mampu menjaga kelestarian budaya beserta bahasa yang dimiliki akan semakin berkembang.

Akhimya, apresiasi yang mendalam kepada Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, RRI Sungailiat, Komunitas Budaya; sebagai mitra pendidik yang telah mewadahi gerakan mengenali, memahami, dan melakukan kegiatan seni budaya. Semoga akan berlanjut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterlibatan publik, masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap budaya dan bahasanya itu menjadi cerminan atau identitas daerah dan masyarakatnya yang menjawab tujuan pendidikan membangun jati diri bangsa.

JUARA

III

Dedy Iswanto
Guru SMK Diponegoro
Lebaksiu, Tegal
Jaw Tengah

Pendidikan Bermutu, Perlu Sinergitas

Kita sadari akan arti pentingnya pendidikan bagi kehidupan bangsa. Pendidikan wajib dimiliki oleh siapa saja dan kapan saja. Sebab pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia. Oleh karena itu, setiap manusia berhak menikmati pendidikan secara luas.

Ironisnya, sampai saat ini kita belum bisa menikmati pendidikan yang layak. Sebab, sampai saat ini sistem pendidikan di Indonesia sedang mengalami status 'gawat darurat'. Dimana banyak permasalahan pendidikan di Indonesia yang kini menjadi polemik, antara lain: kurikulum yang belum konsisten, fasilitas dan akses pendidikan belum merata dan berkeadilan, lemahnya tata kelola dan birokrasi pendidikan, kurang matangnya regulasi dan program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti PIP bagi siswa kurang mampu, sertifikasi guru, tunjangan guru, UKG, status guru honorer, serta masih lemahnya peran pelaku pendidikan, seperti mutu PTK.

Salah satu faktor penyebab permasalahan tersebut yaitu kurang sinerginya antara pemerintah pusat dengan daerah sertabelum adanya pelibatan publik dalam penyelenggaraan pendidikan. Sampai saat ini, koordinasi dan interaksi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam penanganan masalah pendidikan dinilai belum maksimal. Sebab, dengan kebijakan dan program pendidikan yang belum matang dan ditambah lagi dengan adanya perombakan secara struktural dalam kementerian

terian pendidikan dan kebudayaan. Halini dinilai sebagai faktor utama penyebab kurangnya sinergitas antar pemerintah tersebut. Selain itu, pelibatan publik dalam penyelenggaraan pendidikan juga dinilai belum nampak. Sampai saat ini, publik hanya dilibatkan dalam manajemen pendidikan saja, seperti dewan pendidikan dan komite sekolah, tetapi tidak terlibat langsung dalam aktivitas pendidikan itu sendiri.

Permasalahan pendidikan tersebut sudah dianggap sebagai sebuah kelaziman. Namun, kini saatnya pemerintah, dalam hal ini lembaga pemerintah yaitu kementerian pendidikan dan kebudayaan harus dapat mengubah cara pandang tersebut di seluruh institusi birokrasi. Jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani secara serius, maka kondisi pendidikan di Indonesia lambat laun akan menjadi kian terpuruk. Lalu siapakah yang bertanggung jawab akan lemahnya mutu pendidikan?. Sejauhmanaperan pemerintah dengan melibatkan publik dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu?.

Dalam kaitannya dengan konsep pendidikan yang bermutu, Sallis (1993:280) menganalogikan bahwa pendidikan adalah jasa yang berupa proses kebudayaan. Pengertian ini berimplikasi pada adanya masukan (input) dan keluaran (output). Masukan dapat berupa siswa, sarana prasarana, serta fasilitas belajar lainnya termasuk lingkungan. Sedangkan keluarannya adalah lulusan atau alumni, yang kemudian menjadi ukuran mutu.

Untuk itu, dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, tentunya pemerintah dan publik harus dapat terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan agar saling mendukung dalam memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal serta menjadikan siswa yang berkarakter dan bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat.

Pemerintah dan Pelibatan Publik

Dalam upaya mewujudkan pendidikan yang bermutu, tentunya diawali dari suksesnya pembangunan pendidikan. Salah satu langkah utama dalam mewujudkan pembangunan pendidikan yang sukses, yaitu den-

gan adanya sinergitas antara pemerintah dengan pelibatan publik. Pemerintah dalam hal pendidikan yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan masyarakat (publik) merupakan kelompok-warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan (UU Sisdiknas no. 20 tahun 2003).

Pendidikan merupakan tanggungjawab negara secara konstitusional. Tetapi perlu kita sadari bahwa pendidikan secara moral adalah tanggung jawab kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat (publik). Pemerintah tidak bisa menjalankan penyelenggaraan pendidikan jika tidak didukung oleh publik. Sebab, pemerintah hanya dapat membuat kebijakandan program tentang penyelenggaraan pendidikan. Dimana penyelenggaraan pendidikan tersebut akan dilakukan oleh publik, dalam hal ini pelaku pendidikan yang ada di sekolah (siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, dan orang tua). Disamping itu, peran publik di luar sekolah, seperti organisasi masyarakat, dewan pendidikan, komite sekolah, dan dunia usaha pun dinilai sangat penting dalam rangka mengawasi seluruh penyelenggaraan pendidikan. Sehingga publiklah yang dapat menilai dan mengevaluasi tinggi rendahnya kualitas pendidikan yang dicapai.

Pemerintah harus dapat melibatkan publik dalam hal perencanaan pendidikan, baik kebijakan maupun program pendidikan. Sehingga dapat menghasilkan kebijakan dan program pendidikan yang matang. Dengan perencanaan yang matang, tentunya seluruh kegiatan/proses pendidikan dapat berjalan secara maksimal.

Disamping itu, pemerintah juga harus dapat bersifat transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan. Perlu kita ketahui bahwa pemerintah pusat pada tahun 2016 telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN. Namun, pada tahun 2016 ini pemerintah pusat hanya menganggarkan 49,23 triliun dibandingkan tahun 2015 sebesar 53,27 triliun. Hal ini disebabkan oleh fungsi pendidikan yang tidak hanya be-

rada di pusat, namun juga diaplikasikan pada daerah masing-masing. Dimana anggaran pendidikan tersebut dialokasikan untuk belanja mengikat dan belanja tidak mengikat. Untuk itu, peran publik sangat diperlukan dalam rangka pengawasan anggaran pendidikan sehingga anggaran pendidikan dapat teralokasikan sesuai dengan tujuannya.

Selain itu, pelibatan publik juga perlu dilakukan dalam hal penyelenggaraan pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dimana penguatan peran publik tersebut dapat diawali dan dibangun lewat dewan pendidikan dan komite sekolah. Terbangunnya dewan pendidikan dan komite sekolah yang kuat/berdaya, mandiri, dan aspiratif pada dasarnya akan mendorong terbangunnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Selanjutnya, dengan pelibatan publik dalam evaluasi pendidikan dinilai sangat penting. Sebab, semua kegiatan pendidikan perlu dilakukan evaluasi demi mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik. Hal ini dinilai sangat tepat dan perlu diselenggarakan secara berkesinmbungan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Belum maksimal

Kini, pemerintah sebenarnya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melibatkan publik dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dibuktikan dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan yang diselenggarakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan di Depok, Jawa Barat sejak tanggal 21-23 Februari 2016. Dalam acara tersebut dihadiri oleh sekitar 1.000 peserta, yang pesertanya bukan hanya dari kalangan birokrasi lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, tetapi juga dari tokoh masyarakat (publik).

Namun, peran pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan pelibatan publik dinilai belum maksimal. Sebab, sampai saat ini pemerintah daerah belum bisa melibatkan publik dalam penyelenggaraan pendidikan. Mereka masih menganggap publik sebagai pihak sebelah mata. Publik dianggap be-

lum mampu untuk menilai dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam teori etis yang dikemukakan Aristoteles, melalui buku yang berjudul *Rhetorica* dan *Ethica Necomachea*. Melalui buku tersebut Aristoteles membedakan antara keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif adalah memberikan keadilan dalam bentuk yang sama kepada semua orang, sedangkan keadilan distributif adalah memberikan keadilan secara proporsional kepada setiap orang.

Oleh karena itu, pentingnya sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerintah dengan masyarakat, tentunya dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dimana sinergitas tersebut dilakukan dengan mengembangkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor di tingkat nasional serta fokus kebijakan dimulai dari mewujudkan birokrasi pendidikan yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, serta melibatkan publik sehingga dapat mewujudkan dunia pendidikan menjadi semakin berkualitas, merata, terjangkau, dan berdaya saing.

Kini saatnya pemerintah dan pemerintah daerah agar dapat memberikan ruang kepada publik untuk terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, baik perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Di sisi lain, pelibatan publik juga diupayakan untuk peduli terhadap pendidikan dalam ekosistem pendidikan. Dengan terbangunnya ekosistem pendidikan, maka secara tidak langsung dapat membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu.

JUARA

III

I Nyoman Tingkat
Guru SMAN I Kuta Selatan
Bali

PERJANJIAN GURU DENGAN SISWA

Setiap kali mengawali masuk kelas pada tahun ajaran baru, sebagai guru saya selalu memulai dengan membuat sejumlah persetujuan dengan para siswa di kelas yang saya ampu. Persetujuan pertama, berkaitan dengan kehadiran saya di kelas yang mungkin akan terganggu, akibat posisi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

Atas gangguan itu saya tawarkan kepada siswa untuk mencari hari pengganti dan para siswa umumnya bersepakat untuk mendukung. Bukan karena siswa takut kepada saya yang kepala sekolah, melainkan karena awal komunikasi yang dibangun mengedepankan tanggung jawab sebagai guru di satu sisi, dan tanggung jawab siswa sebagai pembelajar di sisi lain. Hal itu tampak dari raut wajah mereka yang tegar tanpa beban.

Persetujuan kedua, berkaitan dengan model pembelajaran dan tugas – tugas yang harus diselesaikan para siswa selama satu semester, baik secara kelompok maupun individu, model pembelajaran yang saya tawarkan adalah model kooperatif dengan focus grup diskusi yang diawali dengan membuat makalah singkat yang disarikan dari buku paket yang dijadikan pegangan di kelas. Tidak tertutup kemungkinan siswa dalam satu kelompok bisa mengeksplorasi materi dari berbagai sumber untuk memperkaya dan memperluas wawasan terhadap tugasnya dalam kelompok, seraya mengingatkan mereka supaya tidak

menjadi penumpang gelap dalam mobil kelompok.

Makalah itu lalu dipresentasikan dan didiskusikan dalam kelas dengan kelompok lain sebagai penanggap dibawah bimbingan guru. Di luar itu, saya juga memberikan tugas individu untuk menilai kemampuan siswa secara utuh dibandingkan dengan nilai tugas kelompok.

Persetujuan ketiga, berkaitan dengan model evaluasi yang harus dilakukan selama 1 semester. Mereka sepakat hasil evaluasi bukan semata – mata merepresentasikan hasil ulangan, melainkan juga mencakup seluruh proses yang dikerjakan siswa baik dikelas maupun diluar kelas, termasuk perhitungan nilai siswa yang mewakili sekolah diluar tugas pembelajaran, seperti mewakili sekolah ditingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional. Dengan kesepakatan itu, para siswa tampak tidak ragu – ragumengekspresikan diri menjaga dan membela nama baik sekolah. Seraya mengingatkan bahwa setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru.

Pijakan

Tiga persetujuan itu menjadi awal pijakan yang membangun komunikasi dalam pembelajaran selanjutnya. Namun diluar itu juga saya selalu minta siswa menuiskan harapannya terhadap setiap guru yang mengajar di kelas. Langkah ini saya lakukan untuk membangun pemahaman bahwa bukan hanya guru yang berhak mengevaluasi muridnya, melainkan juga murid berhak menilai gurunya. Hal ini sejalan dengan rencana model baru Penilaian Kinerja Guru yang melibatkan siswa, orangtua dan atasan. Dengan demikian hubungan guru – murid – orangtua dan atasan adalah relasi saling menilai dan mengontrol sehingga terjadi keseimbangan hubungan yang sangat diperlukan untuk mengembangkan suasana demokratis ditengah – tengah karut marut demokrasi diluar kelas.

Dari harapan para siswa itu, saya menjadi tahu tipe guru dimata siswa. Jika Ngainun Naim (2011) membedakan guru menjadi 2 : Guru inspiratif dan guru kurikulum, siswa cenderung memilih guru inspiratif. Guru inspiratif dimata siswa di kelas yang saya ampu dapat diklasifikasi-

kan menjadi 3. Pertama, guru yang paham kebutuhan siswa yang pada hakikatnya adalah manusia unik. Dengan demikian penugasan yang diberikan kepada siswa harus memperhatikan prinsip – prinsip pembelajaran dengan mempertimbangkan kecepatan penankaoan siswa terhadap materi ajar yang bervariasi. Kedua, guru yang memiliki rasa humor sehingga tidak monoton dan membangkitkan semangat siswa untuk belajar. Disini siswa berharap agar guru benar – benar jadi seniman. Penghibur kelas disatu sisi tanpa melupakan muatan substansi pembelajaran secara akademik di sisi lain. Tuntutan ini bukanlah pekerjaan mudah bagi para guru apabila mereka lahir bukan dari kedalaman hati keguruan.

Apalagi, mereka yang memilih profesi guru karena terpaksa atau hanya sekadaar iming – iming gaji atau tunjangan profesi guru. Karena pekerjaan sebagai guru menuntut per(hati)an segenap jiwa raga demi seluruh siswa di dalam kelas. Ketiga, guru yang tidak pilih kasih pada para siswanya. Siswa menginginkan guru professional dalam melaksanakan tugas dan memisahkan kepentingan ekonomi pribadi dengan tugas keguruan disekolah. Kepentingan ekonomi itu misalnya, guru membuka bimbingan belajar, tetapi tetap bisa membedakan antara tugas mendidik dan mengajar dikelas secara objektif.

Siswa dan guru

Begitulah, guru dimata siswa. Guru kalau dilihat dari suku kata pembentuknya berasal bahasa sansekerta, dari ‘gu’ dan ‘ru’. Gu artinya gelap dan ru artinya terang. Tugas guru adalah menjadi penerang ditengah kegelapan siswa menemukan jati dirinya. Tida kberlebihan kalau Sartono menulis lirik lagu hymne guru dengan ungkapan ‘ engkau s’bagai pelita dalam kegelapan ...’ ungkapan itu selarut dengan Wiana (2013) yang mengutip Regveda (I.6.3) dengan menyebut bahwa guru sebagai putra sang fajar. “ Ketum krnwan aketave, Peso marya apesase, Sam Usadhir ajayatah “ Artinya, “ Hai umat manusia sebagai guru yang dilahirkan bersama fajar. Berilah pengetahuan kepada mereka yang bodoh. Berilah kerupawanan kepada mereka yang buruk rupa

Buruk rupa bukan dalam arti fisik semata, tetapi lebih pada sehat jasmani dan rohani.

Disinilah guru dituntut untuk membangun anak didik secara utuh dan menyeluruh. Untuk maksud itu, guru perlu lebih dahulu memahami dirinya secara utuh dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dengan demikian, relasi komunikasi guru – murid dadalah relasi fungsional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Dari dalam kelas sekolahlah masa depan bangsa dipertaruhkan. Jangan – jangan hiruk pikuk suasana negeri belakangan ini merupakan representasi dari suasana kelas sekolah dua puluh tahun silam karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Pendidikan tidak bisa dirasakan sebagai makanan cabai yang begitu dimakan langsung terasa pedasnya.

Oleh karena itu, tepet benar edaran menteri pendidikan dan kebudayaan Anis Baswedan, 15 April 2015 tentang pedoman perayaan hardiknas 2016. Dalam edaran tersebut ditetapkan hardiknas 2016 di-peringati sebulan penuh pada bulan mei, yang disebut bulan pendidikan. Dengan mengusung tema “ nyalakan pelita, terangkan cita – cita “. Dengan subtema berbeda – beda setiap minggu : kembali kesekolah, ekspresi merdeka, anak adalah bintang, dan semua murid, semua guru. Dengan tema dan subtema itu terimplisit gagasan kembali ke taman siswa sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara. Nyekar ke makam Ki Hajar Dewantara tentu menjadi pilihan tepat untuk membangkitkan patriotism dikalangan generasi muda. Selamat mengisi bulan pendidikan. Dari duamg kelas sekolah mimpi anak sebagai bintang dibinarkan melalui perjanjian guru dan siswa

*" Menulis adalah suatu cara untuk berbicara,
suatu cara untuk berkata, suatu cara untuk menyapa
suatu cara untuk menyentuh seseorang
yang lain entah dimana.
Cara itulah yang bermacam - macam
dan disanalah harga kreativitas ditimbang - timbang "*
Seno Gumira Ajidarma

Juara Lomba Feature 2016

Tema
Keterlibatan publik dalam aktivitas
Pendidikan dan Kebudayaan

JUARA

I

Gugum Rachmat Gumilar
Pikiran Rakyat

REKSA BUDAYA DI BOGOR RAYA

Di Bogor, kebudayaan hanya dibatasi oleh seruas jalan. Jika berada di Jalan Sholeh Iskandar dan melaju ke arah barat, di sebelah kanan adalah perumahan warga yang sehari-hari menggunakan bahasa Betawi. Sebaliknya, masyarakat yang berdomisili di sebelah kiri pengendara atau sisi selatan jalan ini, menggunakan bahasa Sunda sebagai media berkomunikasi. Tidak ada yang salah, juga tidak pernah ada masalah. Warga di sana sepakat, bahwa perbedaan bahasa merupakan bagian dari konsekuensi peradaban. Namun, mereka juga sepaham, kebudayaan lokal mana pun harus tetap dipertahankan. Jangan sampai, bosan timbul lantas tenggelam.

Damanhuri (26), sehari-hari, tinggal di Kampung Pabuaran, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanahsereal, Kota Bogor. Daerah yang berada di sebelah utara Jalan Sholeh Iskandar. Bahasa Betawi sudah dia gunakan sejak lama. Ibarat kata, sejak pertama kali lidah bisa mengeluarkan nada. Bahasa Betawi menjadi bahasa keseharian dalam aktivitasnya. Baik di luar rumah maupun saat berkumpul bersama ayah, ibu, dan kakaknya di kediaman.

Bukan tak mengerti bahasa Sunda. Daman, begitu dia biasa disapa, masih bisa menanggapi pertanyaan atau pernyataan yang dilontarkan dengan bahasa khas Jawa Barat tersebut. Namun dalam melafalkannya, dia mengaku tidak bisa. Tak cuma karena terbatasnya perbendaharaan kata, lebih jauh lagi, dia takut salah bicara.

“Tapi, karena tinggal di Bogor, waktu SD, pelajaran muatan lokalnya ya bahasa Sunda. Jadi, memang pernah belajar,” kata pria yang mengaku lajang ini, pertengahan April 2016.

Dari sisi selatan Jalan Sholeh Iskandar, apalagi semakin mengarah ke Cianjur dan Sukabumi, kebudayaan yang ada di tengah masyarakat Bogor Raya relatif makin terasa nyunda. Setidaknya dalam hal bahasa dan intonasi bicara. Bukan sekadar dari pelajaran Mulok di sekolah, Ananda Fitri (16) mengaku, ia lahir, tumbuh, dan dewasa berbalut bahasa Sunda dalam kesehariannya. Setidaknya sampai kini menjadi siswi kelas XI SLTA di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Namun, dia mengakui, pada beberapa kesempatan, termasuk saat berkumpul bersama teman, bahasa Indonesia tak bakulah yang acap digunakan.

“Tapi Bogor kan dulunya pusat Kerajaan Sunda gitu, jadi tetap harus dipertahankan Sundanya,” tutur dia saat ditemui “PR” di Jalan Lawang Gintung, Kota Bogor, April 2016.

Inilah Jalan Lawang Gintung. Jalan yang sebenarnya tampak sederhana, selumrah ruas jalan-jalan lain di Bogor Raya. Tempat kendaraan-kendaraan berhiliran, mengantar penumpangnya menuju masing-masing tujuan. Namun sekaligus jalan tempat sebuah kawasan, yang disimpulkan oleh sejarawan Edi S Ekadjati (1945-2006), sebagai lokasi kompleks keraton Kerajaan Sunda di ibukotanya yang bernama Pakuan.

Mantan ketua Pusat Studi Sunda tersebut menyampaikannya melalui makalah berjudul “Asal-Usul, Lokasi, Perkembangan Pakuan Pajajaran” yang diterbitkan dalam buku Seri Sundalana 13: Politik Agraria dan Pakuan Pajajaran (2015). Edi menulis, lebih jauh, ibukota Pakuan Pajajaran itu dapat dilokalisasikan sebagai berikut. Ibukota tersebut terletak di antara dua sungai yang mengalir sejajar menghimpit di sebelah barat dan timurnya. Kedua sungai tersebut adalah Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane. Di daerah sepanjang aliran antara dua sungai tersebut, mengalir pula sebuah sungai yang lebih kecil, yaitu Sungai Cipakancilan. Adapun kompleks keratonnya berada di bagian selatan Kota Bogor sekarang, di sekitar Jalan Lawang Gintung.

Dalam makalahnya itu, Edi bahkan mendeskripsikan denah Kota Pa-

kuan. Dia menulis, Kota Pakuan Pajajaran terbagi atas dua bagian, yaitu kota dalam dan kota luar yang batasnya sekitar pertemuan Jalan Batutulis dan Jalan Bondongan sekarang. Kota dalam adalah bagian kota di mana kompleks keraton berada. Kota luar adalah bagian kota sebelah luarnya. Kedua bagian kota itu dibatasi oleh benteng berupa bukit kecil memanjang.

Di buku yang sama, Yoseph Iskandar, dalam makalah berjudul “Nilai Tradisional dan Sejarah Pakuan Pajajaran Menurut Naskah Kuna”, memberi gambaran singkat mengenai bentuk istana raja di Pakuan Pajajaran, seperti yang dilaporkan Tome Pires pada Abad ke-16. “Mengenai istana tempat kediaman raja, terdapat rumah-rumah yang besar dan indah, terbuat dari kayu dan palem. Istana dikelilingi oleh 330 pilar (kayu) sebesar tong anggur yang tingginya mencapai 4 pathom (kira-kira 9 meter) dengan ukiran indah di setiap puncaknya,” kata Yoseph. Sebagai ibukota Kerajaan Sunda, jelas Pakuan bukan sebatas tempat berdiam sekelompok penghuni. Pakuan merupakan kota besar di nusantara, tempat tumbuh kembangnya sebuah peradaban manusia. Kebesaran Kota Pakuan ditegaskan oleh sejarawan Saleh Danasasmita (1933-1986) dalam buku Sajaarah Bogor (1983). Sejarawan kelahiran Sumedang ini memaparkan bahwa Pakuan dihuni penduduk yang jumlahnya mendekati 50.000 jiwa. Ia menulis, pada zamannya, Kota Pakuan merupakan kota paling besar kedua di Indonesia, setelah Demak dengan penduduk 49.197 jiwa. Serta masih dua kali lipat lebih banyak dari penduduk Pasai (23.121 jiwa), sebagai kota ketiga terbesar.

Pada masa sekarang, petunjuk bahwa di Bogor Raya pernah berdiri Kerajaan Sunda sebenarnya masih bisa terlihat. Berjalan-jalan di sini bahkan tak ubahnya membaca daftar hadir nama-nama bernilai sejarah. Meski memang harus sambil menggali referensi, tentang arti di balik nama setiap tempat yang dilalui.

Selain nama asli suatu daerah, banyak pula nama berimpresi Sunda yang sengaja diberikan sebagai pupur-gincu ornamen perkotaan. Nama-nama itu diberikan untuk menyebut jalan, gedung, atau fasilitas

publik lainnya. Di Kota Bogor, misalkan, nama Pakuan merekat pada Jalan Pakuan, Universitas Pakuan, sampai bus kota dengan label Trans Pakuan. Nama Pajajaran tak kalah dimasyhurkan, direkatkan pada se-ruas jalan dan sebuah stadion milik Pemerintah Kota Bogor.

Jalan yang dinamai Pajajaran bahkan merupakan jalan protokol yang membelah Bogor dari selatan ke utara. Meniti jalan tersebut, juga akan melewati Tugu Kujang sebagai ikon kebanggaan Kota Bogor yang menjulang sekira 25 meter. Tugu yang menegaskan bahwa inilah tanah Kerajaan Sunda, dengan kujang sebagai senjata khasnya, pernah berdiri dahulu kala. Tak cuma satu kujang. Ornamen kujang juga berderet di sepanjang Jalan Pajajaran, di sekitar tugu yang diresmikan pada Juni 1982 tersebut.

Terus bergerak ke arah Jakarta, memasuki wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, Pajajaran tak lagi dipilih sebagai nama. Ruas jalan tersebut berganti nama menjadi Jalan Raya Bogor. Ornamen kasundaan baru terlihat lagi di Jalan Raya Tegar Beriman. Bukan nama jalannya karena “Tegar Beriman” adalah motto juang Kabupaten Bogor yang baru ditetapkan pada 1995. Akronim dari tertib, segar, bersih, indah, mandiri, aman, dan nyaman. Bukan pula Stadion Pakansari yang cuma selemparan batu dari Jalan Tegar Beriman. Nama Pakansari dipilih mengikuti nama kelurahan tempat stadion itu berdiri. Di Jalan Tegar Beriman yang melalui kompleks pusat pemerintahan Kabupaten Bogor, berdiri sebuah tugu kujang kembar. Namanya Congkrang Kujang Papanangan. Didirikan oleh Tirta Kahuripan, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor.

Melestarikan sejarah jelas bukan sekadar memoles jalanan dengan pupur-gincu kebudayaan. Namun pendirian ornamen dan pemilihan nama diakui ampuh mengabadikan kesan bahwa di sini Kerajaan Sunda pernah berjaya. Melestarikan sejarah, jika hendak menempatkan pemerintah sebagai pemeran utama, hal paling penting yang perlu diperhatikan tentu saja kebijakan budaya.

“Bogor itu unik, ada Sunda, Betawi, Tionghoa, bahkan Arab. Budaya kan selalu berakulturasi dan berkembang, lalu menghasilkan budaya Bogor itu sendiri, itu yang kami dorong. Tapi karena dulunya Bogor juga adalah Pakuan, itu pun jelas harus didorong, apalagi kita punya warisan budaya berupa silat yang hebat, Di tiap kecamatan ada perguruan silat,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Rahmat Surjana.

Sama halnya dengan pupur-gincu penamaan dan ornamen kota, mata pelajaran Mulok (muatan lokal) di sekolah, seperti yang pernah dirasakan Daman dan Ananda, diakui tak memadai untuk meregenerasi kecintaan terhadap warisan Kerajaan Sunda. Namun hal itu setidaknya cukup untuk mengenalkan dan memberi tahu bahwa para siswa itu adalah cucu-cicit dari penduhunya, masyarakat Kerajaan Sunda. “Mulok di Bogor sudah jelas isinya budaya Sunda. Tinggal bersama para pengawas, harus ditekankan dan dimatangkan penerapannya,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Dace Supriadi.

Lepas dari pupur-gincu budaya di jalanan kota, juga boleh jadi tak pernah mengikuti pelajaran Mulok di bangku sekolah, pada kenyataannya masih ada warga Bogor Raya yang setia. Menjaga warisan yang diturunkan oleh karuhun Kerajaan Sunda. Mereka kerap tak disadari keberadaannya, bahkan tak dianggap penting eksistensinya. Namun mereka tetap berdiri di barisan pertama, menolak pudarnya warisan budaya. Mereka tersebar di seluruh penjuru Bogor Raya. Meski jumlahnya tak seberapa, merekalah reksa budaya yang sesungguhnya.

#Selisik (2)

Bertahan dengan “Pamali”

KETELATENAN Ocid dalam merawat leuit menunjukkan betapa berharga bangunan mungil itu untuk dia dan keluarga. Ayah dua anak ini bahkan sedang serius membersihkan rumput liar di sekitar leuit miliknya, saat “PR” beranjang ke sana pertengahan April 2016.

Di Kampung Urug, Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, leuit milik Ocid berjajar rapi bersama puluhan bangunan serupa milik warga lain. Beberapa di antaranya lengkap dengan sepasang alat tumbuk berupa lesung dan alu. Itulah leuit, yang dalam bahasa Indonesia kaprah disebut lumbung padi.

Berada di antara lumbung-lumbung padi di Kampung Urug, kesan tradisional seketika terasa. Bagaimana tidak, arsitekturnya begitu nyunda. Mulai menilik dari bawah, bangunan mungil ini menggunakan konsep panggung. Lantainya berjarak sekira satu jengkal dari permukaan tanah. Setiap lumbung rata-rata memiliki luas 2x3 meter dan tinggi total 4 meter. Secara keseluruhan, bahan bangunan yang digunakan berupa kayu dan bilik. Di bagian atas, atap menjulang lancip dengan tirai-tirai daun sebagai penutupnya.

Saking pentingnya bangunan ini untuk warga Kampung Urug, jika kerusakan sebuah lumbung tidak bisa lagi diperbaiki, bangunannya akan dirobohkan agar bisa dibangun lumbung baru. Pembangunan dilakukan bersandingan bahu dengan sejumlah tetangga. Lumbung milik Ocid, setakat kini sudah berusia dua belas tahun. Sebelumnya, di lokasi sama, lumbung yang dibangun orang tuanya juga pernah berdiri. Menjadi pelindung butir demi butir padi yang akan mereka konsumsi.

Seperti milik warga lain, di lumbung milik Ocid, tersimpan pucuk-pucuk padi hasil jerih payahnya dalam bertani. Sebanyak 3.000 pucuk padi bisa disimpan di sana. Jika tanpa dijual, jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk menghidupi satu keluarga kecil Kampung Urug selama dua tahun.

Pengisian lumbung dilakukan empunya setiap musim panen, dua kali dalam setahun. Sementara itu, pengambilan padi dilakukan dua kali dalam sepekan. Sekali mengambil, secukupnya untuk tiga-empat hari. Hari pengambilan juga tak sembarangan. Mengambil padi hanya dilakukan pada Minggu dan Kamis. Tidak boleh di luar waktu yang ditentukan. Hari Minggu dan Kamis pun bisa menjadi waktu terlarang. Itu

terjadi jika si pemilik lumbung menyimpan padinya di hari tersebut. Intinya, pengambilan padi juga tidak boleh dilakukan pada hari yang sama dengan hari penyimpanan.

Keharusan menyimpan padi di lumbung, sampai aturan tentang hari pengambilan, lir undang-undang bagi warga Kampung Urug. Mereka menaati kemudian mewariskannya dari generasi ke generasi. Tidak ada yang berani melanggar, apalagi nekat menyimpan hasil tani di dapur rumah sendiri.

“Pamali. Manusia dan padi itu punya tempat sendiri-sendiri. Kita di rumah, ya padi di leuit. Kalau melanggar, pasti kwalat walaupun tidak langsung. Biasanya ke kesehatan diri atau orang-orang terdekat,” kata Ocid, yang tak tahu persis tahun kapan dia dilahirkan.

Selain kata pamali yang sangat mereka segani, warga Kampung Urug percaya, setiap aturan yang diwariskan, menyimpan pesan kehidupan dari leluhur mereka. Tentang keharusan menyimpan padi di lumbung, misalnya, boleh jadi, sang karuhun hendak mengajarkan anak-cucunya ihwal berhemat. Belajar untuk bersyukur atas seikat padi di dapur, yang hanya cukup untuk 3 sampai 4 hari. Padahal, jelas-jelas, lumbung yang cuma selemparan batu dari rumah, bisa menjamin hidup mereka sampai dua tahun ke depan.

“Memang tidak semua rumah punya, tapi tidak masalah karena bisa bersama-sama. Yang penting, padi harus disimpan di leuit, itu sudah aturan di sini.” ucap Titi, seorang ibu yang juga hanya bisa memperkirakan bahwa dia berusia 40 tahun.

Penduduk Kampung Urug juga percaya, aturan adat ditetapkan secara matang berdasarkan pengalaman hidup para pendahulu. Pada kenyataannya, beragam aturan adat perihal padi tersebut terhimpun membentuk sistem ketahanan pangan. Sistem yang menghindarkan kemelaratan bak orang kota akibat fluktuatifnya harga makanan. Sistem karya leluhur yang bisa jadi lebih baik ketimbang skema ketahanan

pangan modern. Sistem yang bisa jadi tak disadari karena berbalut kata pamali.

Berjarak 60 kilometer arah barat daya Cibinong, keberadaan kampung ini menjadi separtun oase di antara padang modernisasi di Bogor Raya. Kampung Urug atau nama tepatnya Kampung Urug Lebak, dihuni oleh tak kurang dari 500 keluarga. Mereka menempati 400-an rumah di perkampungan tersebut.

Sebagai perkampungan yang masih menjaga warisan Kerajaan Sunda, beragam sendi kehidupan di Kampung Urug diatur secara detail oleh adat. Tata cara menyimpan dan mengambil padi hanya secuil dari banyak aturan adat yang mereka miliki. Aturan adat tersebut berlaku pula dalam tata cara bertani, berkebun, berternak, mendirikan bangunan, sampai pergaulan antarpenghuni. Tak ada yang lepas dari aturan turun-temurun buatan nenek dan kakek moyang ini.

Di Kampung Urug, hukum adat diturunkan lintas generasi secara lisan. Oleh karena itu pula, Abah Ukat sang kepala adat Kampung Urug, menyebut himpunan aturan-aturan tersebut dengan nama Kitab Carék. Carék, dalam bahasa sunda berarti ucapan bernada larangan.

Secara keseluruhan, di Tatar Pasundan, aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat sudah ada sejak zaman Kerajaan Sunda dulu. Bentuknya bahkan sudah tertulis seperti naskah undang-undang pada zaman sekarang. Dalam karya tulisnya yang lain, yakni buku Kebudayaan Sunda Zaman Pajajaran (2005), Edi S Ekadjati mengonfirmasi hal ini. Dia memaparkan jenis-jenis aturan yang dibuat Kerajaan Sunda untuk mengatur kehidupan mereka, termasuk rakyatnya. Sejarawan asal Kuningan itu menulis, Carita Parahyangan dan Sanghyang Siksa Kandang Karesian mengemukakan bahwa ada tiga macam himpunan peraturan (undang-undang) yang berlaku pada masa Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda, yaitu Déwasasana, Rajasasana, dan Manusasana.

Déwasasana adalah aturan tentang penyembahan terhadap dewa, berupa himpunan peraturan atau ajaran yang bertalian dengan pemujaan dewa atau zat yang maha tinggi serta penerapannya dalam kehidupan manusia. Rajasasana adalah aturan tentang kehidupan raja, berupa himpunan peraturan yang bertalian dengan hak dan kewajiban raja dalam memimpin dan menjalankan roda pemerintahan. Adapun Manusasana adalah aturan mengenai kehidupan manusia secara umum berupa himpunan ajaran yang bersumber pada ajaran agama dan tradisi leluhur yang menjadi pedoman hidup manusia seluruhnya, baik rakyat biasa maupun para pembesar negara.

Berbicara aturan adat, Abah Ukat tak mau main-main. Menurut dia, ada sejumlah sebab yang membuat pelanggaran adat bisa dianggap lebih berbahaya ketimbang melanggar hukum negara, bahkan hukum agama. Saat melanggar hukum negara, seorang kriminal bisa meminta keringanan hukuman dari pengadilan, bahkan mengemis pengampunan dari pemerintah. Ketika melanggar norma agama, masih ada peluang pengampunan lewat kesucian pintu taubat. Namun, sekali melanggar adat, kwalat tak perlu menunggu kiamat. (Gugum Rachmat Gumilar/"PR")

#selisik (3)

Takdir Sebagai Penjaga

LALU lintas di Jalan Batutulis, Kelurahan Batutulis, Kota Bogor mencapai puncaknya menjelang tengah hari. Jalanan hanya cukup untuk dua lajur kendaraan roda empat. Namun mobil dan motor rata-rata melaju cepat, seolah sibuk sendiri-sendiri. Papan nama di sebelah kanan jalan tak banyak dilirik. Pagar besi berwarna hijau di depannya, ditambah rimbunan daun pohon, cukup untuk membuat papan itu luput dari perhatian. Papan besi putih bertuliskan "Situs Prasasti Batutulis", situs yang juga menjadi asal penamaan ruas jalan dan kelurahan ini.

"PR" berkesempatan menyambangi lokasi itu akhir Februari 2016 lalu. Dua pemuda setempat --yang menjadi sukarelawan pengatur parkir-- menyambut ramah. Sebenarnya, tak ada tempat parkir di sana. Kend-

araan pengunjung cuma diposisikan di pinggir jalan. Pantas jika kedua pemuda itu harus bersusah payah mengatur letak kendaraan di antara ramainya lalu lintas.

Tamu lokasi ini tak seramai tempat wisata rekreasi. Namun ada saja yang mengunjungi. Satu-dua orang pulang, dua-tiga lainnya datang. Lokasi prasasti batutulis berada tepat di pinggir ruas jalan. Memasuki gerbang yang hanya selebar satu meter, tumpukan batu kali langsung ada di depan mata. Di bagian tengah tumpukan, batu panjang menancap tegak serupa tiang. Kata orang sekitar, ini merupakan tempat mengikat kuda, dulunya. Beberapa tumpukan sejenis ada di sisi lain area situs, di sekeliling bangunan utama yang berukuran sekitar 5x5 meter.

Namun, belum sampai di bangunan utama, seorang ibu berbaju batik sudah beranjak dari tempat duduknya. Ia menyambut tak kalah soméah. Sesekali bercanda. Masih segar meski raut usia lanjut tak mampu lagi disembunyikan. Sejurus berlalu, buku tamu dia sodorkan bersama sebuah pena. Ada kolom nama, asal, dan tanda tangan. Itu sudah layaknya prosedur bagi tamu, sekaligus menjadi tugas harian ibu bernama Maemunah ini. Jika tak ada pengunjung, ia menghabiskan waktu dengan duduk manis di pelataran bangunan utama. Menikmati teduh pohon dan semilir angin yang juga meniup rimbunan bambu kuning di sana. Terus seperti itu kegiatan Maemunah, setidaknya selama 24 tahun terakhir, setiap hari sejak dia berusia 52.

Aktivitas harian Maemunah di area situs dimulai sejak pukul 07.30. Membersihkan halaman, menyapu lantai, sampai mengepel bangunan utama. Bagian dalam bangunan utama --yang menyimpan beberapa batu peninggalan-- juga menjadi tanggung jawab Maemunah. Dia baru kembali ke rumahnya, tak jauh dari sana, saat jarum jam menunjukkan waktu pukul 15.00.

Kemesraan Maemunah dengan kompleks situs Batutulis tak begitu saja terjalin, melainkan turun temurun entah bermula dari generasi mana.

Setidaknya, sepengetahuan dia, sang kakek yang bernama Ci'ong pun mengemban tugas serupa. Saat kakeknya meninggal, tugas menjaga kompleks prasasti diwariskan kepada generasi selanjutnya.

“Kakek saya juga warisan dari leluhurnya. Setelah Aki Ci'ong lalu dilanjutkan Uwak Acep. Kemudian ibu saya, Emak Cicih; lalu saya. Awalnya saya menjawab tidak bisa, tapi ini warisan, mungkin sudah takdir keluarga kami untuk menjaga ini,” kata ibu dari tujuh anak itu.

Selain Prasasti Batutulis, di dalam bangunan utama, terdapat batu-batu peninggalan lainnya. Yakni lingga sebagai simbol kesuburan dan kekuasaan yang menjulang sama tinggi dengan prasasti, batu berisi sepasang tapak kaki, batu berisi satu tapak serupa lutut, dan batu yang dipercaya sebagai tempat bersandar. Semuanya berada di dalam bangunan utama dengan posisi yang masih dipertahankan. Hanya dasarnya yang sudah dilapisi lantai dan karpet merah. Berdiam diri di sana setiap harinya, bagi Maemunah seakan sedang bermesraan dengan sosok idolanya, Prabu Siliwangi.

Prasasti Batutulis diketahui ditulis dengan aksara Jawa Kuna, tetapi menggunakan bahasa Sunda Kuna. Prasasti tersebut berangka tahun 1455 Saka atau 1533 Masehi. Meski dibuat untuk menegaskan jasa-jasa Prabu Siliwangi, para pakar sejarah meyakini prasasti ini ditulis setelah sang prabu meninggal dunia.

Saleh Danasasmita dalam *Nyukcruk Sajarah Pakuan Pajajaran Jeung Prabu Siliwangi* (2003) menyebut, bisa dipastikan bahwa saat prasasti dibuat, Sri Baduga telah tiada. Itu karena di dalamnya disebutkan Prabu Ratu Purané. Sementara itu, “purané” berarti ‘suwargi atau al-marhum’.

Yoseph Iskandar dalam esai berjudul “Nilai Tradisional dan Sejarah Pakuan Pajajaran Menurut Naskah Kuna” yang dimuat dalam *Seri Sundalana 13: Politik Agraria dan Pakuan Pajajaran* (2015) juga memaparkan, Prasasti Batutulis Bogor dibuat oleh Prabu Surawisesa, putera Sri Ba-

duga Maharaja, untuk mengenang jasa ayahanda suwargi, dalam hal “Pembangunan Kota Bogor” yang waktu itu terkenal dengan sebutan Dayeuh Pakuan.

Peninggalan berupa prasasti dari masa Pakuan, tentu bukan cuma Batutulis. Seperti yang diungkapkan Edi S Ekadjadi dalam bukunya Kebudayaan Sunda Zaman Pajajaran (2005). Dia menyebut, telah ditemukan 24 prasasti yang berasal dari masa Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Mayoritas ditulis di atas batu, ada pula yang ditulis di media logam. Ada yang masih tersimpan di lokasi penemuan, ada pula yang sudah diangkut ke museum.

Terlepas dari dimana prasasti-prasasti itu diletakkan, banyaknya jumlah prasasti memastikan bahwa selain Maemunah, masih banyak orang lain yang setia menjaga prasasti warisan Kerajaan Sunda dengan komitmen dan rasa cinta yang sama.

Namun, di tengah tingginya kanyaah Maemunah terhadap Prasasti Batutulis, ada satu keinginan dia untuk kompleks bersejarah ini. Hanya satu. Jangan ada yang merusak, itu sudah lebih dari cukup. Maemunah masih ingat betul rasa sakit hati 14 tahun lalu. Saat Menteri Agama era Megawati, Said Agil Husin Al Munawar menggali sebagian area kompleks Prasasti Batutulis. Ada harta karun peninggalan Prabu Siliwangi, begitu dalih sang menteri. Harta tak didapat, lubang galian menganga yang tersisa.

“Katanya mau direhab, malah dirusak. Menteri agama harusnya ngerti, orang pinter kok kaya begitu. Saya mah nyaah, kakek saya juga berpesan jangan rusak tempat ini, itu saja,” ucapan Maemunah meninggi. Kini, Maemunah sudah memasuki tahun ke-76 dalam hidupnya. Masih bugar, tapi menyiapkan penerus harus segera dilakukan. Siapa pun sosoknya, yang penting ada kelanjutan generasi. Sang anak, Firman (49) adalah orangnya. Memang sudah menjadi kebiasaan di keluarga ini, penerus harus sudah siap saat tugas generasi sebelumnya dinyatakan selesai. (Gugum Rachmat Gumilar/“PR”)

#Selisik (4)

Perjanjian tak Tertulis dengan Palu “Teupa”

DEDE (20), terlihat serius memalu kujang berukuran kecil. Panjangnya Cuma 5 sentimeter. Masih jauh dari rampung, tetapi bentuk khasnya sudah terlihat. Kuningan digunakan sebagai bahan kujang mungil tersebut.

Mulanya, pelat kuningan dibubuhi pola. Setelah itu dicetak dengan pemotong khusus lalu dipukul-pukul ringan menggunakan palu. Langkah terakhir dilakukan untuk merapikan bentuk kujang. Nantinya kujang berukuran kecil ini digunakan sebagai gantungan kunci. Ada pula beberapa kujang mungil lain yang sama-sama masih berlangsung pembuatannya, tinggal ditempel jarum agar bisa menjadi bros.

“Kalau kujang sungguhan yang untuk pusaka, itu diteupa bukan dicetak seperti ini. Bahannya juga besi baja,” ujar Dede saat berbincang dengan “PR”.

Selain Dede, beberapa anak muda yang usianya tak jauh berbeda, juga tampak sibuk di bangunan bernama gosali itu, di dalam area Paneupaan Kujang Pajajaran, Jalan Parungbanteng, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, pertengahan Maret 2016 lalu. Begitu aktivitas mereka setiap hari di pinggiran Sungai Katulampa ini, terutama menjelang siang.

Gosali, dalam bahasa Sunda, berarti bengkel pembuatan perkakas, khususnya senjata. Di sanalah sang guru teupa berjibaku dengan api dan baja panas. Sementara itu, paneupaan berarti kompleks penemuan secara keseluruhan. Sama halnya dengan tempat ini. Selain gosali tempat Dede dan rekan-rekannya membuat miniatur kujang, ada sebuah galeri di Kompleks Paneupaan Kujang Pajajaran tersebut. Gosali dan galeri letaknya berhadap-hadapan, terpisah oleh seruas jalan desa yang lebarnya cuma tiga meter.

Galeri tersebut sebenarnya merupakan ruang tamu dari rumah sang guru teupa. Seluas kira-kira 5x6 meter. Sudut-sudut ruangan dipenuhi etalase berisi deretan kujang beragam jenis. Mulai dari kujang mini yang dibuat Dede di gosali sampai kujang sungguhan berukuran normal. Di sela kujang-kujang yang berderet, sejumlah plakat dan sertifikat penghargaan turut terpampang. Tak ketinggalan beragam klipng koran yang mencantumkan kisah tentang paneupaan ini, tertera di dinding menggunakan pigura. Meski hampir siang, cuaca di luar masih teduh. Cocok untuk sekadar berbincang ringan dengan sang guru teupa.

ADALAH Wahyu Affandi Suradinata (63), perintis sekaligus pemilik Paneupaan Kujang Pajajaran ini. Mulai menyukai kujang sekitar tahun 1994, lalu mencoba membuatnya mulai tahun 2000. Setakat kini, penempaan ini menjadi satu-satunya tempat pembuatan kujang yang mampu mempertahankan eksistensinya di Bogor Raya.

Untuk membuat kujang, beragam bahan baku bisa digunakan. Mulai dari besi, baja, kuningan, aluminium, sampai campuran bahan antara besi dan baja. Jika bahan kuningan cukup dipotong berdasarkan pola yang telah dibubuhkan, pembuatan kujang dari bahan logam lainnya lebih rumit. Pembuatan kujang dari besi sebenarnya agak mirip, tetapi harus menggunakan gunting besar bahkan alat las untuk memotongnya seturut pola. Sementara itu, untuk bahan aluminium, sang guru teupa harus membuat cetakan terlebih dahulu, kemudian dicor dengan aluminium panas yang mencair. Proses penempaan yang sesungguhnya dilakukan jika kujang dibuat dari baja. Beruntung, saat ini banyak tersedia baja yang sudah berbentuk lempengan. Tak perlu lagi sang guru teupa memprosesnya sejak awal. Lempengan baja dibakar dan ditempa sampai bentuknya sesuai keinginan. Landéan (gagang) dan sarangka kujang dibuat kemudian.

“Bayangkan, zaman kerajaan dulu, tidak ada lempengan baja atau teknik cor seperti sekarang. Jadi, sebenarnya, baik kujang maupun keris, zaman dulu tidak ada yang rapi. Juga susah untuk membuatnya runcing. Zaman dulu, kalau ingin runcing, senjata itu digosok dengan

batu oleh guru teupa sampai berhari-hari,” kata pria yang karib disapa Abah ini.

Ada enam jenis kujang yang dibuat Paneupaan Kujang Pajajaran. Yakni kujang bangkong, kujang badak, kujang naga, kujang jago, kujang ciung, dan kujang kuntul. Bentuk-bentuk tersebut diyakini sebagai bentuk kujang aslinya sejak masa Kerajaan Sunda dahulu. Kujang bangkong merupakan pegangan para guru, kujang badak menjadi senjata kalangan sarawarsa atau prajurit, kujang naga untuk jaro dan kanduru atau para kepercayaan raja, kujang jago untuk balapati atau panglima perang, kujang ciung digunakan para bupati dan wakilnya, sedangkan kujang kuntul menjadi senjata bagi para patih dan mantri. Keyakinan ini pula yang membuat Wahyu enggan berkreasi lebih jauh meski cuma mengubah bentuk gagang kujangnya.

“Saya masih pegang tetekon atau aturan adat, misalkan yén landéan kujang wangun cékér kidang, ya sudah bentuknya saya buat seperti itu. Di Bandung, bentuk kujang banyak diulik, termasuk gagangnya yang dibuat berbentuk maung. Tidak apa-apa, berarti ada inovasi, dan itu bagus karena bagian dari seni,” tutur Wahyu.

Bagi masyarakat Sunda, kujang lebih dari sekadar bilah-bilah senjata. Kujang kerap diartikan sebagai identitas, jatidiri, simbol pemersatu, dan banyak lagi filosofi lainnya. Budayawan Sunda, Jakob Sumardjo, dalam artikel yang berjudul “Kujang dan Masyarakat Sunda” (Pikiran Rakyat, 26 Februari 2008) mengemukakan hal ini. Dia memaparkan, Kujang adalah simbol medium transendensi daya-daya gaib yang diperlukan manusia. Inilah sebabnya proses pembuatannya, dahulu, dilakukan di tempat-tempat khusus, jauh dari kampung. Pelipatan tiga penempaan-nya juga menunjukkan asas tripartit. Dulu, orang perlu puasa atau pantang dalam menempa kujang tertentu yang menunjukkan bahwa jenis senjata ini memang bertuah (sakral).

Begitu pun adanya bagi seorang Wahyu, dia menyebut kujang sebagai perlambang sumber kehidupan. Setidaknya untuk dirinya sendiri.

Tempaan-tempaan palu yang dia pukulkan pada lempengan logam adalah bentuk penghormatan kepada karuhun. Langkah nyata untuk mempertahankan apa yang pernah dibuat para leluhur.

Keadaan saat ini memang tidak mudah menurutnya. Jangankan orang asing, urang Sunda sendiri banyak yang tidak mengerti arti, makna, filosofi, dan tujuan dibuatnya kujang. Cuma sampai tahu bentuk. Fenomena ini menjadi keprihatinan paling mendalam bagi sang guru teupa. Apalagi, dia menggeluti berbagai bidang kasundaan sejak lama. Terhitung 1977 bahkan sudah menjadi ketua di sebuah paguron silat.

Kemajuan zaman tak bisa terelakkan, juga tak akan mampu dilawan. Namun menurutnya, kasundaan sebagai jatidiri jelas harus dipertahankan. “Ada sejenis sumpah tak tertulis, sampai mati, saya mau ngagugulung kasundaan. Sampai liang kubur akan berselimut kasundaan. Allah sudah menggariskan demikian,” kata ayah enam anak ini.

Hampir tengah hari, Paneupaan Kujang Pajajaran mulai dihantam terik. Mengiringi laju air Katulampa, benturan palu teupa dengan logam masih bersahutan, entah sampai kapan. (Gugum Rachmat Gumilar/”PR”)

#selisik (5)

Bogor Raya Tetap Ibukota

MENILIK sejarahnya sebagai tilas pusat pemerintahan Kerajaan Sunda, Bogor Raya harus tetap mempertahankan keibukotaannya. Maemunah, Wahyu Affandi, Abah Ukat, Ocid, dan Titi hanya segelintir dari puluhan, bahkan ratusan orang di wilayah ini yang berjuang mempertahankan hal itu. Mempertahankan kasundaan sebagai identitas mereka. Namun, di luar orang-orang tersebut, jelas ada ribuan bahkan jutaan yang membiarkan warisan sosiologis Pakuan Pajajaran sedikit demi sedikit tenggelam. Hilang dari kehidupan karena diterungku zaman.

Fenomena ini disadari betul keberadaannya. Termasuk oleh budayawan Sunda asal Bogor, Eman Sulaeman. Dalam bincang ringan bersama

“PR” di kediamannya, Jalan Durian, Kota Bogor, awal April lalu, Eman banyak mengungkapkan kekhawatiran. Secangkir teh hangat di sepertiga pertama malam, menjadi pelengkap pandangan-pandangan Eman tentang kebudayaan.

Dari semua jenis warisan budaya di Bogor Raya, dia menyebut bahasa sebagai salah satu yang paling terancam eksistensinya. Eman bahkan memperhitungkan, jika ketidakpedulian masyarakat Bogor Raya terus berlangsung, bahasa Sunda Bogor akan hilang dalam lima tahun.

Tak begitu mengejutkan sebenarnya mendengar ramalan tersebut. Pasalnya, penggunaan bahasa Sunda di Bogor Raya, terutama perkotaan, memang terus tergerus bahasa lain. Mulai dari bahasa Indonesia, Melayu, Betawi, sampai bahasa yang tidak jelas susur-galurnya.

“Coba perhatikan di angkot-angkot, anak-anak SMP sudah tidak ada yang pakai bahasa Sunda. Bahasa yang mereka pakai sebenarnya tidak jelas, bahasa Indonesia bukan, bahasa Jakarta (Betawi) juga bukan. Yang pakai bahasa Sunda saat ini paling cuma kalangan tua. Coba bagaimana itu?” kata Eman.

Penulis Buku Toponimi Bogor ini begitu menyayangkan. Pasalnya, bahasa Sunda Bogor memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bahasa Sunda di wilayah Tatar Pasundan lainnya, semisal wilayah Bandung Raya dan Priangan Timur.

Di belahan Tatar Pasundan lain, terdapat pengastan bahasa yang begitu bertingkat-tingkat. Untuk menunjukkan aktivitas makan saja, kata yang digunakan beragam jenisnya. Mulai dari dahar, tuang, neda, sampai yang paling kasar seperti nyatu, lelebok, atau lolodok. Menurut Eman, kondisi itu disebabkan wilayah-wilayah tersebut sempat terpengaruh budaya Mataram.

Berbeda dengan daerah-daerah tadi, bahasa Sunda Bogor tidak seperti demikian. Di sini, bahasa yang digunakan sama, baik saat berhadapan

dengan orang yang lebih tua maupun kalangan setara dan yang lebih muda. Dahar, ya dahar. Tanpa undak usuk dan tata-titi pengastaan. Raja dan rakyat sama bahasanya. Inilah bahasa orang agraris yang sesungguhnya. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Sunda di Bogor Raya seharusnya lebih mudah dilakukan.

Lepas dari aspek bahasa, banyak hal lain yang terlalu berharga untuk dihilangkan, malah seharusnya bisa dibanggakan. Salah satunya adalah fakta bahwa Kerajaan Sunda merupakan negara yang sangat jaya pada masanya. Eman mencontohkan betapa hormatnya Bangsa Portugis kepada Kerajaan Sunda pada zaman dulu. Itu karena masyarakat Sunda pada masa tersebut berpikiran maju, terbuka dalam pergaulan, dan ramah pada siapa pun. Tome Pires dari Portugis, selepas kunjungannya ke wilayah Kerajaan Sunda, langsung melapor pada atasannya perihal perlakuan yang dia peroleh. Pires mengatakan, dia diterima oleh sekelompok masyarakat yang disebut masyarakat Sunda, yang sangat baik dan ramah terhadap tamu. Pada kenyataannya, selepas kunjungan tersebut, rasa penasaran bangsa Portugis pada Kerajaan Sunda terus berlanjut. Sampai pada Abad ke-16, bangsa Portugis dan Kerajaan Sunda akhirnya menjalin sebuah kerjasama. Lir hubungan bilateral pada masa sekarang.

Paparan Eman ini juga pernah diungkapkan sastrawan Yoseph Iskandar dalam Nilai Tradisional dan Sejarah Pakuan Pajajaran Menurut Naskah Kuna. Dia mengemukakan sekilas kejayaan Kerajaan Sunda, yang juga diambil dari catatan perjalanan Tome Pires dalam kunjungan kenegaraan pada 1513 ke Pakuan Pajajaran. Yoseph menulis, menurut catatan reportase Tome Pires, penduduk ibukota Pakuan Pajajaran ada 50.000 jiwa. Pelabuhan-pelabuhan penting yang tercatat, Banten, Pontang, Cigede, Tanggerang, Kalapa, Karawang, dan Cimanuk. Dengan demikian, Tome Pires menyebut Kerajaan Sunda sebagai Negeri Kesatria dan Pahlawan Laut. Komoditas ekspornya beras, lada, kain tenun, tamarin (asam). Impornya tekstil halus dari Cambay, kuda dari Pariaman 4.000 ekor per tahun. Alat pembayaran uang emas dan kepeng.

Jika suatu saat kasundaan di tilas ibukota bernama Pakuan ini benar-benar hilang, pendapat Eman, maka kesalahan ada pada semua dari kita. Mulai dari orang tua yang tak mengajarkan, sekalipun cuma mewariskan bahasa; pemerintah yang tidak menjaga, meski hanya dengan membangun museum; sampai anak-anak muda yang enggan melanjutkan, walau sekadar dengan menyelipkan Sunda dalam karya-karyanya. Dulu, sebagai ibukota kerajaan, jika hancur Pakuan, hancur pula Kerajaan Sunda. Begitu pun saat ini. Jika kasundaan di Bogor Raya rusak, maka bisa rusak pulalah kasundaan di seluruh Tatar Pasundan. “Dulu, Pakuan itu ibukota Kerajaan Sunda, jadi sampai sekarang harus dipertahankan kasundaan-nya, keibukotaannya,” tegas Eman.

Penguohan Pakuan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Sunda yang sebelumnya ada di Kawali (wilayah Ciamis sekarang), menjadi salah satu peristiwa paling penting yang pernah terjadi di Bogor Raya. Prosesi itu dipercaya terjadi pada 3 Juni 1482. Pada kenyataannya, sampai dengan sakarang, tanggal itu pula yang diacikan sebagai hari jadi Bogor, baik kota maupun kabupatennya. Ulang tahun bersama, menjaga kasunndaan-nya pun bersama-sama. Semoga.. (Gugum Rachmat Gumilar/“PR”).

JUARA

II

M. Taufan Surya Putra
Media Indonesia

Melihat Dunia Lewat Skola Lipu

Masyarakat adat Tau Taa Wana tidak mengenal pendidikan formal. Mereka melihat dunia dengan mampu membaca, menulis dan berhitung lewat skola lipu.

Sekumpulan anak tanpa memakai alas kaki, tanpa seragam, ada juga yang bertelanjang dada duduk bersila di sebuah rumah adat Banua Bae di Desa Taronggo, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah.

Kadang-kadang kaki mereka diselonjorkan karena capek duduk bersila. Kadang kaki kesemutan karena harus ditekuk dalam waktu lama. Mereka adalah anak-anak dari komunitas adat Tau Taa Wana, yang sengaja berkumpul di Banua Bae untuk belajar membaca, menulis dan berhitung. Mulut-mulut kecil sibuk mengeja huruf-huruf yang ada tertera di buku. Ada juga kelompok lain yang menuliskan angka-angka.

Terlebih saat musim panen tiba, jumlah anak yang belajar di Banua Bae cukup banyak. Mereka membantu memanen padi sekaligus belajar menulis, membaca dan berhitung. Tidak semua anak belajar di Banua Bae, sebuah rumah adat mirip gubuk besar tanpa dinding. Anak-anak terkadang memilih belajar di pinggir sungai (koro) atau di hutan (pangale) yang tidak jauh dari perkampungan mereka. Biasanya anak-anak belajar sambil berburu burung atau memungut buah saat berada di koro dan pangale.

Ketika malam tiba, suasana lipu cukup sepi, terdengar suara anak-anak dari dalam rumah sedang membaca dengan suara cukup lantang. Terkadang kakak atau orang tua mereka ikut membantu cara mengeja huruf atau merangkai kata.

Ahmad, 10 salah satu anak yang belajar membaca dan menulis mengaku belum pernah belajar di sekolah umum. Tidak ada meja atau kursi. Bahkan tidak ada seragam. Anak-anak tidak bersepatu.

“Belajar dengan teman-teman di skola lipu,” kata Ahmad diamini teman-temannya.

Skola lipu sebutan bagi komunitas adat Tau Taa Wana untuk tempat belajar. Sekolah itu berada di dalam hutan yang dekat dengan perkampungan mereka. Mereka belajar di Banua Bae yang dibangun di dalam hutan. Di tengah anak-anak belajar membaca, menulis dan berhitung, sekelompok orang dewasa ikut bergabung dengan anak-anak.

Mereka selain mengawasi juga terlibat diskusi untuk memajukan pendidikan untuk komunitas adat ini. Di sekolah tersebut tidak ada guru profesional layaknya sekolah umum. Mereka hanya punya Tau Mampatundek (fasilitator belajar) dari anggota komunitas sendiri, yang ketebulan pernah mengenyam pendidikan dasar di sekolah formal meski tidak tamat.

Berbekal kemampuan literasi dasar yang dimiliki, para fasilitator itu mengawal proses belajar keaksaraan, megandalkan papan tulis ukuran 50 x 50 cm yang tampak sudah berubah warna menjadi abu-abu. Jika kapur tulis habis, ubi kayu (singkong) yang dikeringkan dijadikan kapur tulis.

Saat ini peserta didik sudah menggunakan buku tulis, pensil, dan pulpen sebagai alat tulis. Namun pada awal-awal Skola Lipu diselenggarakan beberapa peserta belajar hanya menggunakan daun pisang muda sebagai buku tulis dengan lidi sebagai penanya.

Tiga bangunan perpustakaan sederhana yang mereka sebut banua

baca atau rumah baca melengkapi proses belajar Skola Lipu. Buku-buku yang ada di banua baca ini sumbangan dari masyarakat. Dari perpustakaan inilah, komunitas Tau Taa Wana bisa mengetahui bagaimana situasi dan perkembangan yang ada di luar.

Tidak rumit

Bagi komunitas Tau Taa Wana, menyekolahkan anak-anak mereka tidak harus dengan persyaratan yang rumit. Mereka tidak bergantung pada gedung sekolah atau sarana belajar yang lengkap untuk bisa belajar membaca, menulis dan berhitung. Koordinator Skola Lipu Yayasan Merah Putih, Abdul Ghofur menjelaskan masyarakat adat Tau Taa Wana secara administratif menempati tiga wilayah. Mulai dari Kabupaten Tojo Unauna, Banggai, dan Morowali Utara.

Kondisi alam tempat tinggal komunitas Tau Taa Wana terpencil, dikelilingi lembah dan pegunungan. Kondisi medan yang jauh dan susah dijangkau sehingga fasilitas pembangunan, seperti sekolah dan puskesmas tidak ada. Kondisi wilayah seperti itu menyebabkan masyarakat adat Tau Taa Wana susah berinteraksi dengan masyarakat luar. Bahkan mereka sering dibodohi.

“Dengan kehadirannya Skola Lipu di tengah-tengah komunitas adat membantu sebagian masyarakat bisa memiliki pengetahuan, tidak gampang dibodohi,” tegas Ghofur. Memang bagi komunitas adat masih susah beradaptasi dengan sekolah formal karena pada kurikulum tertentu tidak sesuai dengan keberadaan masyarakat adat. “Kehadiran Skola Lipu ini menjadikan masyarakat Tau Taa Wana bisa mandiri melalui pendidikan keaksaraan. Hal itu bisa membantu komunitas dalam menggali dan memahami nilai-nilai lokalnya sendiri,” tambah Ghofur. Dia menjelaskan Skola Lipu sebetulnya sebuah komunitas belajar keaksaraan sesama dan bersama anggota komunitas adat Tau Taa Wana dalam lingkungan lipu.

Awalnya Skola Lipu dibuka di Desa Taronggo pada 2012 atas permintaan masyarakat adat Tau Taa Wana. Sebab sebelumnya sekolah

serupa sudah dibuka di Desa Dataran Bulang, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Unauna. “Berawal dari situ kemudian kami dari Yayasan Merah Putih membuka Skola Lipu di Desa Taronggo. Dahulu murid dan pengajarnya banyak. Sekarang tinggal beberapa saja,” ungkap Ghofur. Kurangnya murid yang ada saat ini di Skola Lipu bukan karena tidak ada lagi anak-anak Tau Taa Wana yang ingin belajar. Saat ini beberapa anak sudah pindah ke sekolah umum. Bahkan beberapa anak di antaranya diberikan kemudahan untuk melompat kelas karena kemampuannya membaca, menulis, dan berhitung cukup memuaskan.

Pendidikan untuk Semua

Kehadiran Skola Lipu di komunitas adat Tau Taa Wana selain melembagakan proses belajar, juga mengembangkan nilai budaya dan meningkatkan kemandirian komunitas melalui pendidikan keaksaraan. “Itu (Skola Lipu) tidak berlaku untuk anak-anak saja. Para orang tua Tau Taa Wana juga bisa belajar di sana. Adanya Skola Lipu, seluruh orang di komunitas dapat membaca, berhitung, dan menggali lagi nilai-nilai adatnya,” kata pengajar Skola Lipu, Indo Imel.

Untuk menyukseskan program pendidikan itu, Yayasan Merah Putih membutuhkan bantuan dan peran pihak luar, terutama dalam pengembangan materi belajar dan kapasitas guru lokal. “Untuk bisa mencapai itu disepakati adanya kurikulum yang menjadi pedoman dalam proses pembelajaran,” tambah Imel.

Pembuatan kurikulum Skola Lipu melalui proses panjang sekitar dua tahun, dan melibatkan masyarakat setempat. Hingga 2012 telah diselesaikan modul kurikulum pembelajaran keaksaraan yang dijadikan panduan guru lokal dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Imel menjelaskan, materi kurikulum Skola Lipu selain baca, tulis, dan berhitung secara substansi isi topik mata pelajarannya mengarah pada kemandirian dan rasa tanggung jawab. Contohnya kompetensi dasar membaca yakni mengenal, membaca, dan menulis nama tumbuhan binatang yang ada di dalam lipu.

“Dalam penerapannya diawali dengan pelatihan penggunaan modul pembelajaran bagi guru lokal,” ungkapnya. Dan simulasi dalam pelatihan modul lanjut Imel, bagaimana merencanakan pembelajaran, teknik evaluasi hasil belajar dan metode memfasilitasi kegiatan belajar.

“Dalam modul tersebut kreativitas mengajar lebih ditonjolkan baik bahan ajar maupun metode yang digunakan, sehingga seluruh peserta belajar di masing-masing lipu bersemangat untuk menerima pelajaran,” imbuhnya.

Koordinator Skola Lipu Yayasan Merah Putih, Abdul Ghofur menambahkan modul kurikulum Skola Lipu yang telah ada nantinya masih akan dikembangkan lagi. Dia sangat berharap pemerintah bisa mengakui keberadaan Skola Lipu. “Kalau sudah diakui, saya yakin modul Skola Lipu yang sudah ada itu nantinya yang dijadikan acuan pemerintah, terkait untuk dikembangkan,” harapnya. Ghofur bahkan bermimpi jika Skola Lipu sudah diakui, dia akan membuat kelas khusus bagi anak-anak yang dianggap sudah memiliki kemampuan.

“Selama ini memang Skola Lipu tidak membatasi peserta didiknya dengan kelas. Manfaatnya kalau nanti sudah bisa menggunakan kelas, anak-anak yang sudah pintar membaca tidak digabungkan lagi dengan anak-anak yang belum bisa membaca. Begitu seterusnya,” tutupnya.

Menghapus Sebagai Objek Pembodohan

Setelah melalui perjalanan panjang penuh berliku, Skola Lipu akhirnya bisa diterima keberadaannya, dan diakui Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Pemkab Morowali Utara akan mengusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar Skola Lipu dapat diakui dan masuk ke dalam bidang pendidikan layaknya sekolah umum lainnya.

Wakil Bupati Morowali Utara, Moh Ashrar Abd Samad sangat mengapresiasi aksi dari Yayasan Merah Putih sehingga dapat membangun Skola Lipu secara swadaya di Desa Taronggo, Kecamatan Bungku Utara. “Ini merupakan aksi sosial yang sangat berarti bagi anak-anak Tau Taa

Wana. Harus kita dukung dan kita perjuangkan sehingga bisa diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Ashrar saat berbincang dengan Media Indonesia.

Skola Lipu bagi Ashrar sangat membantu masyarakat Tau Taa Wana di seluruh lipu yang ada di Desa Taronggo. Pasalnya, setelah masyarakat adat tersebut mengetahui baca, tulis, dan berhitung melalui Skola Lipu pasti akan mudah bagi mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar lipu mereka.

Selain itu, mereka tidak jadi objek pembodohan lagi bagi pengepul jika mereka hendak menjual hasil buminya yang diperoleh dari lingkungan lipu maupun dari hutan. “Pekerjaan utama mereka bertani ladang, mencari damar, dan berkebun. Nah hasilnya itu biasa mereka tukar atau jual dengan pengepul yang sering datang ke Desa Taronggo. Dulu kalau mereka melakukan transaksi selalu ada yang dibodohi karena tidak tahu membaca dan berhitung. Sekarang banyak dari mereka yang sudah pintar dan tidak lagi jadi objek pembodohan,” cerita Ashrar.

Skola Lipu bagi Ashrar sangat menjawab segala kebutuhan yang selama ini diinginkan oleh masyarakat Tau Taa Wana yang hanya hidup di lipu-lipu Desa Taronggo. “Karena ini sangat berguna, maka harus segera diakui dan diperhatikan pemerintah. Saya akan perjuangkan Skola Lipu. Dan dalam waktu dekat saya akan menghadap ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membicarakan Skola Lipu. Nanti saya akan bawa semua dokumentasi foto

maupun video Skola Lipu biar bisa disaksikan secara langsung oleh orang-orang di kementerian,” ungkap Ashrar. Selain pengakuan yang diharapkan, Pemkab juga sangat mengharapkan setelah adanya pengakuan bisa dibarengi dengan pemberian bantuan dalam bentuk apa pun sehingga Skola Lipu bisa terus bertahan.

“Di sana peserta didiknya belum mengenakan seragam sekolah. Alat-alat yang digunakan dalam sekolah pun tidak sesuai. Makanya ini semua

akan kami sampaikan biar kementerian bisa memberikan bantuan. Paling tidak bantuan mereka nantinya bisa bertahap hingga memberikan pengajar yang benar-benar linear,” imbuh Ashrar.

Manager Informasi dan Kampanye Yayasan Merah Putih, Kiki Rizki Amelia menyambut hangat apresiasi yang diberikan Pemkab Morowali Utara.

“Kami akan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh Pemkab tentang Skola Lipu. Dan kami siap jika diminta untuk mendampingi ke kementerian,” ujar Kiki. Sejauh ini Yayasan Merah Putih sudah banyak mengumpulkan dokumentasi tentang Skola Lipu. Mulai dari awal berdirinya hingga saat ini. Bahkan penyusunan konsep pembelajaran termasuk kurikulum dan tenaga pengajar Skola Lipu sudah dimatangkan oleh tim khusus yang dibentuk yayasan tersebut.

“Skola Lipu nantinya bukan hanya sekadar sekolah kampung biasa. Di masa mendatang Skola Lipu harus bisa bersaing dengan metode dan penerapan pembelajaran sekolah umum lainnya. Namun tidak menghilangkan roh Skola Lipu sebenarnya,” jelas Kiki.

Saat ini proses belajar di Skola Lipu sudah meningkat. Proses belajar anak-anak menggunakan pensil, pulpen dan buku. Bahkan pengajarnya sudah menggunakan papan tulis dan kapir tulis. Hal menggembarakan, lanjut Kiki saat ini anak-anak di komunitas adat Tau Taa Wana.

JUARA

II

Sri Juliati
Satelit Post

Awalnya Dibilang Cari Sensasi

(Ridwan Berkeliling dengan Kuda Menyebarkan Ilmu)

Ada banyak cara untuk melibatkan diri dalam aktivitas pendidikan dan kebudayaan. Namun Ridwan Sururi bersama kuda poni putih, Luna melalui jalan berbeda. Apa yang dilakoninya selama 1,5 tahun belakangan, bagaikan oase di tengah gurun pasir. Kesederhanaan dan kedermawanannya, jadi secercah asa yang bersemayam di kaki Gunung Slamet. “Kae... Kudane teka. Kudane teka... (Itu... Kudanya datang. Kudanya datang).” “Iya, kae wis teka... (Iya, itu sudah datang).” Tak lama, seru-seruan itu berganti dengan suara kaki berlari. Ditingkahi derap kaki kuda, yang menuruni jalanan beraspal, lantas masuk ke sebuah sekolah.

Dengan pelan, seorang pria bertopi koboi, membimbing kuda berwarna abu-abu tersebut, memasuki halaman sekolah yang dikelilingi bangunan kelas dan perpustakaan. Sesampai di sana, puluhan murid SDN 5 Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga telah berdiri, mengantre sambil membawa satu-dua buku di tangan. Tanpa dikomando.

Mereka mahfum, ini adalah hari Kamis (31/3). Harinya mereka bertemu Ridwan Sururi dan kudanya yang membawa sekitar 100-an buku. Artinya, saat jam istirahat pertama tiba, mereka akan berbondong-bondong keluar kelas dan menunggu keduanya.

Sadar kehadirannya begitu dinanti, Ridwan, begitu karib disapa, bergegas mengikatkan kudanya di sudut halaman. Lantas mengambil buku-

buku dari rak kecil yang ia taruh di badan kuda dan menggelarnya di pelataran sekolah. Suasana pun berganti gaduh. Beberapa murid memilih buku yang kembali akan dipinjam, sedangkan lainnya mengeja, membaca judul buku, dan membalik-balikkan lembarnya.

Sementara Ridwan melayani murid yang sudah tak sabar ingin mengembalikan buku. Tanpa jeda, sambil sesekali melayani celotehan mereka. “Deneng nggak bawa Luna, Pak (Kok nggak bawa Luna, Pak)?” tanya seorang murid merujuk pada kuda poni putih bernama Luna yang kerap bersama Ridwan.

“Iya, gantian sama yang lain. Njilih buku apa baen wingi (Iya, gantian sama yang lain. Kemarin pinjam buku apa saja)?” “Jenenge sapa, Pak?” tanya murid lainnya tentang siapa nama kuda yang dibawa Ridwan kali ini dan mengelusnya.

“Germanis.”

Itulah yang terjadi selama 45 menit. Pihak sekolah sengaja menambah jam istirahat yang hanya 15 menit. Satu keistimewaan yang diterima pada para murid dan Ridwan, setiap hari Kamis. Hani merupakan satu di antara puluhan murid yang memanfaatkan keistimewaan itu. Saat Ridwan nampak, murid kelas 4 itu selalu mengamit satu buku untuk dikembalikan, untuk kemudian meminjam satu buku lagi.

“Seneng kalau Pak Ridwan dan kudanya ke sini. Saya suka pinjam buku tentang tokoh-tokoh. Kadang bukan cuma saya saja yang baca, orangtua juga ikut baca,” ujar dia. Aktivitas inilah yang dilakoni warga Desa Serang Brobahan RT 2 RW 5, Kecamatan Karangreja, Purbalingga tersebut selama 1,5 tahun terakhir. Bersama Luna, pria 43 tahun itu berkeliling sembari membawa koleksi perpustakaanya.

Kuda Pustaka, itulah yang nama disematkan Ridwan pada perpustakaan keliling yang ia dirikan akhir Desember 2014. Ide tersebut tak sepenuhnya dari dirinya. Ada nama Nirwan Arsuka di sana, seorang pengusaha yang tinggal di Jakarta dan ia kenal melalui jejaring media

sosial.

Sama-sama pencinta kuda membuat obrolan keduanya lebih cepat nyambung. Ridwan pun tak sungkan berbagi kisah tentang keinginan terpendamnya: bagaimana cara agar kegemaran merawat kuda dan membaca bisa bermanfaat bagi warga sekitar.

“Pak Nirwan ngasih ide, bagaimana bila mendirikan perpustakaan keliling tapi dengan kuda,” ujarnya.

Setali tiga uang, Ridwan mengangguk. Namun masalah pertama datang, bagaimana dengan buku-bukunya? Jumlah koleksi Ridwan masih bisa dihitung dengan jari. Keberuntungan memayunginya. Nirwan bersedia memberinya modal sebanyak 100 buku.

TPQ Miftakhul Huda jadi titik mula cerita tentang Ridwan. ‘Menggandeng’ Luna, kuda yang ia rawat selama enam tahun dan tak pernah ditengok oleh tuannya tiga tahun belakangan, Ridwan menyusuri jalanan, bertemu dengan anak-anak. Meski awalnya mereka lebih tertarik pada Luna, namun tak apa, toh suatu saat nanti, anak-anak itu akan melirik pada rak kecil berisi buku di badan kuda. Ridwan begitu yakin atas keteguhan tersebut.

Tak henti di TPQ Miftakhul Huda, Ridwan lantas menyambangi SDN 5 Serang yang tidak jauh dari rumahnya. Meminta pihak sekolah untuk mengizinkan ia dan kudanya ikut terlibat dalam membudayakan gerakan membaca. Gayung pun bersambut. Keinginan Ridwan mendapat tanggapan positif. Termasuk saat datang ke Kampung Sanggrahan, bertemu dengan warga sekitar.

Tak setiap hari ia berkeliling, menawarkan koleksi bukunya. Hanya tiga hari dalam seminggu, yaitu Selasa, Rabu, dan Kamis. Selebihnya, Ridwan menghabiskan waktu untuk merawat enam kuda yang ditiptkan padanya serta menyewakan jasa kuda wisata di Agrowisata Serang saban akhir pekan.

Bukan berarti apa yang dilakukan Ridwan tanpa aral. Ia masih ingat beberapa cemoohan dan cibiran dari orang-orang di sekitarnya. Ayah empat anak itu dianggap hanya mencari sensasi sebab meminjamkan semua koleksi bukunya secara gratis alias tidak dipungut biaya.

“Ada saja yang bilang kurang kerjaan lah, cari sensasi, atau apalah, tapi ya nggak masalah, namanya juga usaha,” ujar dia mengenang getir waktu itu. Sempat Ridwan minder atas sindiran yang dialamatkan padanya. Namun ia lekas mengingat apa yang menjadi keinginan sekaligus niat terdalamnya. Tak butuh lama, suami Kustiyah bangkit dan mengajak Luna, kembali mengetuk pintu rumah dan sekolah. Semua itu yang lakukan tanpa pamrih. Tanpa berharap sepeser pun imbalan.

Jalan sunyi yang ditempuh Ridwan sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Satu per satu murid TPQ, SD, dan warga mulai tertarik pada koleksi bukunya. Bila anak-anak kerap meminjam buku cerita dan kisah para tokoh, orang dewasa lebih menyukai buku-buku resep, pertanian, kesehatan, dan lainnya. Lambat laun, kedatangan Ridwan pun selalu ditunggu.

“Jujur, saya nggak nyangka bila seperti ini hasilnya. Rasanya senang, akhirnya kami sangat dibutuhkan anak-anak,” kata dia. Tak cuma para peminjam setianya, Ridwan pun merasa tak sabar bila sudah mendekati hari ia berkeliling. Hadir di tengah para murid kini sudah jadi satu kewajiban baginya. Pernah sekali ia tak hadir dan kekecewaan yang teramat dalam menyergap nalurinya.

Kekecewaan Ridwan tak melulu soal ketidakhadiran, namun juga pada jumlah peminjam bukunya. “Nelangsa, mangkel, karo isin nek sing nyilih setitik. Padahal jane akeh apa setitik orang pengaruh maring penghasilan (Prihatin, kesal, dan malu kalau yang pinjam sedikit. Padahal sebenarnya banyak atau sedikit tidak akan berpengaruh pada penghasilan),” ujarnya.

Masih Bermimpi Beri Pelatihan Komputer

Aktivitas Kuda Pustaka milik Ridwan Sururi kini mampu jadi penerang bagi sesama. Setidaknya untuk para murid di TPQ Miftakhul Huda, SDN 5 Serang, dan warga Kampung Pesanggrahan. Lambat laun minat mereka untuk membaca mulai meningkat. Bahkan perlahan sudah jadi budaya.

Anak sekolah kian rajin membuka lembar-lembar buku. Seperti Inami Maidza Hayati, murid kelas 2 SDN 5 Serang, Kecamatan Karangreja, Purbalingga. Kehadiran Kuda Pustaka membuatnya semakin senang membaca.

“Sukanya baca buku yang ada gambar hewan dan tumbuhan, sekarang di rumah juga sudah ada tiga buku,” ujarnya sambil berceloteh riang. Lain lagi dengan warga Kampung Pesanggrahan. Ridwan berkisah, banyak warga terutama ibu rumah tangga yang rutin meminjam bukunya. “Ada warga yang bilang, ‘lah daripada momong anak tok mending sisan maca buku olih ilmu (daripada hanya mengurus anak, lebih baik sekalian baca buku dapat ilmu),’” ujar dia menirukan ucapan warga.

Atau cerita tentang seorang petani yang susah payah mengusir hama ulat gagrak pada tanamannya. Segala metode, kata Ridwan, sudah dilakukan petani tersebut. “Terus dia pinjam majalah Trubus yang saya bawa, ketemu caranya di situ dan berhasil,” kata dia.

Dari pengalaman itulah, warga mulai bersimpati pada usaha yang dilakoni Ridwan. Hingga tak ada lagi cibiran, cemoohan, atau pandangan sebelah mata. Bahkan beberapa sekolah turut meminta Kuda Pustaka untuk datang. Sayang permintaan ini belum bisa ia turuti. Jarak jadi satu alasan. Selain itu, ia hanya sendirian.

“Pernah ngajakin teman lain, sesama orang yang merawat kuda. Tanggapannya beragam. Ada yang terang-terangan menolak, ada yang awalnya mau tapi akhirnya ya ada pamrihnya,” katanya. Padahal, lanjut Ridwan, apa yang dilakukannya hanyalah sebatas menyalurkan hobi,

yaitu berkuda dan membaca. Kerja sosial. Baginya, itu sudah lebih dari cukup membuatnya puas. Niatnya pun tulus, tanpa berharap imbalan. Ia hanya ingin anak-anak di desanya bisa bertambah wawasan dan melihat dunia lebih luas dari apa yang mereka baca.

“Cukup nyong baen sing bodho, bocahan kene aja (cukup saya saja yang bodoh, anak-anak di sini jangan),” katanya.

Bila akhirnya nama Ridwan menjadi buah bibir banyak kalangan, hal itu hasil yang ia tuai atas apa-apa yang dilakukan. Ya, nama Ridwan kian dikenal usai sebuah kantor berita luar negeri, BBC menuliskan ceritanya. Sejak saat itulah, rumah Ridwan tak pernah sepi dari para pemburu berita dan namanya terus menghiasi sejumlah pemberitaan. Termasuk diundang Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo dalam sebuah acara.

Termasuk kunjungan para donatur yang ingin menyumbangkan buku-buku. Baik dari dalam negeri hingga luar negeri. Terjauh kata Ridwan, berasal dari Singapura dan Amerika Serikat. Tercatat, sudah ada 1.500-an buku di rumahnya. Berbagai genre. Berbagai tahun. Tersebar di ruang tamu, salat, dan tengah serta terbagi di dua rak besar di rumahnya. Beberapa masih ada yang tercecer di lantai.

Terbaru, ia menerima bantuan dana dari seorang warga di Jerman, Mr Harmuth, yang mengetahui kisah Ridwan dari stasiun TV lokal. Keduanya belum pernah bertemu, hanya sesekali bertukar kabar melalui telepon.

Sesuai keinginan si donatur, dana tersebut dibelikan satu ekor kuda. Sebab selama ini, Luna, kuda yang membersamai Ridwan, menyebarkan buku-buku, bukanlah kepunyaannya sendiri. Ridwan hanya dipasrahi si empunya untuk membantu merawat.

Hal ini yang sempat jadi ketakutan Ridwan di awal. Ia takut bila tetiba, si tuan akan mengambil kembali kuda miliknya. Bisa jadi, aktivitas Kuda

Pustaka yang ia dirikan berhenti total. Hingga nasib baik tersebut datang, akhirnya Ridwan memiliki kuda sendiri. Germanis namanya. Gabungan dari kata Germany alias Jerman yang jadi negara asal donatur dan manis, merujuk pada paras kuda Sumbawa itu.

“Rasanya lebih tenang. Sekarang tugas Luna akan diambialih oleh Germanis. Meski tak menutup kemungkinan, sekali waktu saya tetap menggunakan Luna karena dia ikon-nya Kuda Pustaka,” ujar dia.

Ridwan bahagia. Satu impiannya, bermanfaat bagi sesama dengan mengenalkan dan menularkan budaya membaca perlahan terwujud. Baginya, kebahagiaan ini tak dapat diukur dengan materi. Apa yang ia lakukan sebatas berkontribusi, turun tangan bagi dunia pendidikan, khususnya bagi generasi pembaharu yang ada di desanya.

“Saya senang bila generasi setelah kami punya pengalaman, pengetahuan yang lebih tinggi dan banyak dari buku-buku yang dipinjam di Kuda Pustaka,” ujar dia. Ridwan ingin terus seperti ini, berkeliling membawa buku bersama kudanya, sampai pada waktu yang tak bisa ditentukan. Ia ingin terus menularkan kecintaannya pada dunia membaca dan buku, melayani anak-anak sekolah yang ingin meminjam, serta warga sekitar yang haus akan ilmu baru.

Namun mimpi Ridwan tak cukup sampai di situ. Ia masih berhasrat mendirikan gedung perpustakaan di halaman depan serta menjadikan rumah kecilnya sebagai tempat latihan mengoperasikan komputer. Pasalnya, anak-anak dan warga di sekitarnya masih gagap menggunakan produk teknologi ini.

“Penginnya ya anak-anak di sini bisa pakai komputer. Bila ada bantuan komputer, saya akan memanggil teman untuk mengajarkan anak-anak, tentu tanpa mengharap imbalan,” ujarnya penuh optimistis.

Sementara itu, Kepala SDN 5 Serang, Jumingan SPdSD memberi tanggapan positif atas apa yang dilakukan Ridwan. Saat kali pertama datang

ke sekolahnya, para muridnya lebih tertarik melirik si kuda ketimbang buku yang dibawa.

Seiring dengan berjalannya waktu, mereka berminat untuk meminjam dan membaca. Hingga seperti yang terlihat sekarang ini. Murid-murid SDN 5 Serang nampak 'rakus' dan menyerbu buku-buku koleksi Kuda Pustaka. Bahkan tanpa diminta, usai Ridwan menyelesaikan tugasnya, mereka akan membantunya membereskan buku-buku yang tersebar di pelataran sekolah.

"Sekolah sangat mendukung apa yang dilakukan Pak Ridwan. Kehadiran dan keterlibatannya mampu meningkatkan budaya dan semangat membaca pada anak-anak serta mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah," ujar dia. (*)

JUARA

III

Puji Purwanto
Suara Merdeka

Menyemai Asa bagi Anak Berkebutuhan Khusus

(Kiprah Kepedulian PSM Terhadap Pendidikan)

Keterbatasan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Banyumas memantik Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat untuk hadir memfasilitasi layanan pendidikan. Harapannya, mereka menjadi pribadi yang mandiri dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Sepuluh siswa penderita tunarungu wicara Sekolah Luar Biasa (SLB) PSM Cilongok, Kabupaten Banyumas tampak semangat mengikuti mata pelajaran PPKn tentang tata tertib di rumah yang diajarkan oleh guru kelas. Mereka kemudian membaca ejaan per kata yang tersusun dalam kalimat.

Selepas itu, para siswa diminta maju satu per satu untuk membaca dibantu oleh guru kelas. Dalam praktiknya, guru mengeja setiap kata dengan menempatkan tangan siswa di lehernya untuk merasakan getaran pita suara dan mengikuti gerakan mulut guru.

Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah siswa memahami tiap kata yang diucapkan oleh guru. "Kami mencoba melatih anak untuk tidak selalu menggunakan bahasa isyarat, tetapi berbicara dan memahami gerakan mulut dari lawan bicaranya," kata Ketua Yayasan SLB Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Cilongok, Saefuddin.

Menurutnya, proses belajar mengajar di SLB PSM Cilongok membutuhkan kesabaran tinggi karena tingkat kemampuan para siswa berbeda dengan sekolah reguler. Bahkan, perlakuan mereka untuk mener-

ima mata pelajaran sekolah pun berbeda dan membutuhkan perhatian khusus.

“Kami mencoba memberikan pelajaran sederhana agar siswa dapat mandiri dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” katanya. SLB PSM Cilongok merupakan sekolah rintisan yang berdiri pada 15 November 2011 dengan jumlah siswa 79 anak. Para siswa dikelompokkan menjadi tiga kelas dengan rincian, kelas A untuk siswa penderita tunanetra, kelas B untuk siswa penderita tunarungu wicara dan kelas C untuk tunagrahita ringan (down sindrom).

Saefuddin menceritakan berdirinya sekolah tersebut untuk menampung anak berkebutuhan khusus (ABK) di wilayah pinggiran. Selama ini, kebanyakan dari mereka tidak bersekolah karena akses pendidikan SLB terbatas yakni hanya terdapat di Purwokerto, sedangkan di sekolah reguler mereka tidak mampu mengikuti proses belajarnya.

Padahal, di dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, sedangkan ayat (2): setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Masalah Ekonomi

“Sesuai undang-undang mereka harus memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan berkualitas untuk masa depan mereka,” tegasnya. Atas dasar itu, Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat terpanggil untuk melakukan pendataan dan penjangingan potensi ABK di wilayah Kecamatan Cilongok yang belum mendapat layanan pendidikan dengan melibatkan para perangkat desa, guru, sekolah dan tokoh masyarakat.

Dari hasil pendataan dan penjangingannya, tercatat 217 anak di Kecamatan Cilongok belum terlayani pendidikan. Mereka tidak bersekolah karena terbentur masalah ekonomi. Sejurus itu, para ABK yang tercatat kemudian diverifikasi dan dikelompokkan sesuai dengan kategori yang

diderita seperti tunagrahita dan tunanetra.

Pada saat bersamaan, Forum Komunikasi PSM merekrut guru yang nantinya menjadi pengajar ABK. Untuk mencari guru tidaklah mudah karena rata-rata relawan yang mendaftar menjadi guru tidak memiliki latar belakang lulusan dari jurusan pendidikan luar biasa.

Para calon pengajar saat itu, merupakan lulusan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Sarjana Agama. Untuk memahami pola belajar mengajar, mereka melakukan observasi ke SLB di Purwokerto dan Banyumas selama tiga bulan. Mereka melihat proses belajar mengajar, hingga praktik dan mengadopsi buku mata pelajaran.

Setelah calon siswa dan guru sudah siap melakukan proses belajar mengajar, terdapat kendala lain yang harus dihadapi. Perintis SLB tidak memiliki tempat untuk belajar. Namun, hal itu tak menyurutkan motivasi untuk membuka SLB. PSM minta izin menumpang di Sanggar Pramuka di Desa Cikidang, Cilongok.

Proses belajar mengajar di Sanggar Pramuka tak berlangsung lama atau hanya berlangsung lebih kurang satu tahun karena sanggar itu selalu digunakan untuk kegiatan kepramukaan. Akibatnya, SLB rintisan tergusur dan terpaksa harus pindah ke tempat lain.

Pengelola SLB kemudian kembali menumpang di Madrasah Diniyah (Madin) di Desa Sudimara, Cilongok hingga sekarang. Meskipun menumpang, pengelola sekolah berupaya memberikan layanan pendidikan terbaik kepada anak didiknya.

Di sekolah itu terdapat delapan guru, masing-masing dua guru mengajar di satu kelas, serta melibatkan dokter psikologis dari RSUD Banyumas untuk konsultasi perkembangan anak didik. Kepala SLB PSM Cilongok, Fitria Nurhayati mengemukakan para pengajar memberikan mata pelajaran mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sekolah Dasar, seperti mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn,

Matematika dan Bahasa Jawa.

Mata pelajaran tersebut kemudian disusun kembali oleh para guru untuk disederhanakan agar siswa dapat menangkap pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Para guru juga sudah mampu beradaptasi dengan para siswa, karena pernah memiliki pengalaman mengajar di sekolah khusus. “Kami melihat dari kemampuan masing-masing siswa, sehingga kami menyederhanakan mata pelajarannya,” terang dia.

Selain memberikan pelajaran akademik, pengelola sekolah memberikan pelajaran nonakademik untuk menggali potensi siswa. Diantaranya dengan memberikan ekstrakurikuler menari, menggambar dan mewarnai serta pantomim.

“Kami sering mementaskan mereka pada sebuah kegiatan. Ini perlu dilakukan agar mereka memiliki rasa percaya diri dan mampu bersaing dengan anak-anak normal umumnya. Selain itu, agar publik melihat bahwa ABK memiliki kemampuan sama dengan anak normal,” timpal Saefuddin.

Tasem (52), salah satu orang tua siswa menuturkan keberadaan SLB di wilayah pinggiran sangat dibutuhkan untuk mendekatkan siswa mengakses layanan pendidikan. Selama ini, banyak anak yang tidak sekolah karena terbentur biaya operasional untuk mengantar anak ke sekolah. “Uang bulanan di SLB PSM cukup murah sebesar Rp 25 ribu per bulan dan tambahan Rp 10 ribu ketika masuk ujian. Tapi, operasional hariannya yang besar karena untuk ongkos ojek dari rumah sampai sekolah Rp 30 ribu per hari,” tutur warga Desa Karangtengah, Cilongok ini.

ABK yang belajar di SLB PSM kebanyakan berasal dari wilayah Kecamatan Cilongok, Ajibarang, Purwojati, Wangon, Gumelar, Pekuncen dan Karanglewas. Di SLB PSM Cilongok, uang bulanan sekolah ditarik secara sukarela. Rata-rata Rp 25 ribu per bulan. Tapi bagi, warga yang tidak mampu tidak diwajibkan membayar uang bulanan.

“Gaji guru sangat sedikit karena uang operasional dari orang tua siswa sangat minim. Tapi kami senang bisa mengabdikan diri di sini,” tutur Fitriah. Kiprah PSM bersama dengan teman-teman guru lainnya belum begitu besar. Karena itu, butuh keseriusan dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi pendidikan untuk ABK sampai wilayah pinggiran. Sebab, diyakini sampai saat ini masih terdapat banyak sekali anak yang belum terlayani pendidikan dengan baik akibat terbatasnya akses pendidikan. “Kami harap pemerintah daerah makin memperhatikan para ABK di Banyumas dengan menyediakan layanan pendidikan yang memadai untuk menunjang kemampuan mereka,” kata Saefuddin.

Sementara itu di Kabupaten Banyumas, jumlah penyelenggara pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus masih minim. Data penelitian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 mencatat di Banyumas jumlah ABK kurang lebih mencapai 1.300 dan dimungkinkan jumlahnya akan terus bertambah.

Sekolah Dasar (SD) yang melayani pendidikan inklusif di Banyumas terdapat 10 sekolah, rinciannya dua SD Negeri dan tujuh SD swasta. Dua SD Negeri yang melayani kelas inklusif diantaranya SD Negeri 5 Arcawinangun dan SD Negeri I Tanjung Purwokerto Selatan.

Sedangkan tujuh sekolah swasta, yaitu SD Annida Sokaraja, SD Putra Harapan Sokanegara Purwokerto Barat, SD Al Irsyad Al Islamiyyah I dan II Purwokerto, SD Santo Yosep Purwokerto Timur, SD Bruderan Sokanegara Purwokerto Timur, SD Al Izzah Kedungbanteng dan SD Banyubelik Karangnangka Kedungbanteng.

Sementara untuk SLB di Banyumas diantaranya SLB Kuncup Mas Banyumas, SLB Yakut (Yayasan Kesejahteraan Usaha Tama) Purwokerto dan SLB PSM Cilongok. Seluruh SLB tersebut berstatus swasta. Pengawas Pendidikan Luar Biasa (PLB) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sarwadi mengungkapkan keberadaan SLB di Jawa Tengah masih jauh dari harapan, sedangkan jumlah SLB negeri dan swasta baru tercatat 170 sekolah.

Padahal, data 2008 anak berkebutuhan khusus usia 7 sampai 15 tahun di wilayah Jawa Tengah jumlahnya mencapai 26 ribu, sedangkan yang telah terlayani atau mengakses pendidikan sebanyak 7 ribu anak.

“Kebanyakan anak yang belum terlayani akses pendidikan SLB adalah mereka yang tinggal di wilayah pelosok dan terbentur masalah ekonomi,” ujarnya saat mengunjungi SLB PSM Cilongok, akhir Maret lalu. Ia menambahkan untuk memberikan layanan pendidikan harapannya satu kecamatan terdapat satu sekolah inklusi. Namun, sampai sekarang belum terpenuhi sebab butuh kesiapan tenaga pengajar melayani ABK.

Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat untuk mendukung layanan pendidikan sangat penting, serta upaya menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa semua anak memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Seperti halnya yang dilakukan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Cilongok. Harapan yang dicapai pengelola SLB PSM adalah siswa dapat memperoleh pendidikan yang sama. Para penderita tunanetra dapat mampu meningkatkan sensor motorik sehingga lebih mandiri berkomunikasi.

Siswa tunarungu wicara bisa mandiri, terampil dan dapat merawat diri sendiri tanpa ketergantungan dengan orang lain, serta mampu mengaplikasikan bahasa artikulasi. (*)

JUARA

III

CM. Ida Tunga Gautama
SKM Minggu Pagi
(Grup Kedaulatan Rakyat)

“Salam”, Memupuk Tunas Manusia Merdeka

BARANGKALI, Anda akan kaget kalau mendapati suasana Sekolah Alam. Apalagi kalau sudut pandang yang Anda pakai adalah frame sekolah konvensional, seperti ada ruang kelas, siswa-siswi berseragam dan tertib mengikuti pelajaran, atau hasil pembelajaran yang merepresentasikan anak pintar dengan nilai tinggi dan anak bodoh dengan nilai rendah. Mungkin, Anda juga akan terkejut, ketika mendapati fakta, lulusan Sekolah Alam yang kemudian melanjutkan pendidikan mereka ke sekolah konvensional mampu menjadi pendorong perubahan suasana persekolahan di sekolah konvensional itu.

“Kami senang dengan lulusan Sekolah Alam. Mereka bisa ngajari anak-anak kami yang lain untuk baris berbaris. Dulu kami susah melaksanakan upacara bendera. Sekarang bisa. Malah lagu Indonesia Raya pun bisa mengalun dengan iringan biola yang digesek oleh siswa lulusan Sekolah Alam,” kata Ny. Sri Wahyaningsih, Kepala Sekolah Alam, menceritakan ucapan seorang kepala sekolah konvensional.

Sekolah Alam terletak di tengah areal persawahan di daerah Nitiprayan, Kasihan, Bantul. Sekolah ini sebenarnya bernama Sanggar Anak Alam atau “Salam”. Namun, banyak orang lebih suka menyebutnya, “Sekolah Alam”. Sekolah ini menyelenggarakan ‘taman belajar’ untuk anak-anak usia Taman Bermain (TB, usia 2-4 tahun), Taman Anak (TA, usia 4-6 tahun), dan Taman Dasar (usia 6 tahun ke atas) yang terdiri dari SD dan SMP.

Pagi itu, tiga anak laki-laki siswa TB asyik berceletoh di jembatan kecil, di depan rumah Ny. Wahya. Tiba-tiba satu di antaranya berteriak, “Aku mau merobohkan rumah laba-laba. Siapa mau ikut?” Ia lalu mengambil tembor kecil dan mengisinya dengan air selokan. Lalu, dituangkannya air dalam tembor itu ke sarang laba-laba yang berada di pinggir sawah. Kedua temannya melihat dengan seksama apa yang bakal terjadi. Robohkah rumah laba-laba itu?

Ditemui MP awal pekan lalu, Ny. Wahya, sapaan akrab Ny Sri Wahyaningsih, menjelaskan tentang konsep pendidikan yang diterapkan Sekolah Alam. Menurutnya, Sekolah Alam sebenarnya sekolah biasa, yang berjalan alamiah. Namun, sekolah ini secara sadar memosisikan diri sebagai wahana belajar untuk memerdekakan anak.

“Memerdekakan di sini bukan bermakna kebebasan, seperti yang sering disalahartikan oleh banyak orang. Memerdekakan berarti mampu mengolah hati, kehendak dan pikiran dengan pendidikan dan hati nurani, mengasahnya sehingga memiliki toleransi dan bela rasa,” papar Ny. Wahya.

Maka, tak sekali pun Sekolah Alam mengungkung siswa dengan sejumlah aturan sekolah yang baku dan kaku. Mereka membebaskan siswa untuk tidak berseragam maupun bersepatu. Di kelas 5 misalnya, anak-anak malah diajak merumuskan ‘aturan main’ bagi diri mereka sendiri. Aturan itu di antaranya berbunyi, menjaga barang pribadi, teman dan milik sekolah; masuk kelas pukul 08.00 dan sudah mandi serta sarapan; saling berbagi; saling mengingatkan; menjaga emosi; bertanggung jawab pada tugasnya; HP digunakan pagi sebelum doa dan setelah doa pulang.

Pelanggaran atas kesepakatan tersebut dijatuhi sanksi, membuat sebuah cerita sepanjang satu halaman yang akan dibacakan di depan kelas pada keesokan hari. Butir-butir kesepakatan berikut sanksi ditulis di atas kertas dan dipasang di dinding kelas 5.

Sejak awal, kata Ny. Wahya, Sekolah Alam memang ingin membuat lingkungan yang kondusif bagi anak agar dapat berkembang dengan baik menjadi manusia yang merdeka, tanpa merasa tertekan oleh siapa pun dan dalam bentuk apa pun.

“Ibarat benih, idealnya setiap anak tumbuh di lingkungan yang pas. Setiap anak juga punya keunikan sendiri-sendiri. Mereka tak mungkin diseragamkan. Namun mereka diharapkan dapat tumbuh dengan baik. Padi tak mungkin tumbuh menjadi pisang, demikian pula sebaliknya,” papar Ny. Wahya.

Ia lalu bercerita tentang seorang siswa kelas 3 yang kini berusia 10 tahun. Siswa tersebut pernah menjadi korban bullying saat duduk di kelas 1 di sekolah konvensional. Ia lalu mogok sekolah dan hanya mau les karate.

“Setelah bisa karate, ia datang ke sekolah itu dan menghajar teman yang dulu mem-bullynya. Setelah itu, ia ndak mau sekolah. Usia 10 tahun, orang tuanya membawanya kemari. Ia belum bisa baca-tulis. Saya bingung, kalau dimasukkan kelas 1 kok kebesaran, tapi kalau di kelas 3 kok belum bisa baca-tulis. Saya ajak anak-anak kelas 3 berdiskusi, ternyata mereka mau menerima anak ini. Mereka antusias sekali mengajari anak ini baca-tulis, sampai bisa. Dan, prosesnya sampai bisa, cepat sekali,” papar Ny. Wahya.

OrangTuaTerlibat

Karena itulah, Sekolah Alam selalu melibatkan siswa dan orang tua dalam setiap proses pembelajaran. Anak menjadi subjek yang harus dihargai dan wajib dihargai. Sekolah, orang tua, masyarakat dan lingkungan berkewajiban mengenali potensi setiap anak, memfasilitasi dan selanjutnya menguatkan mereka.

“Banyak orang tua lupa bahwa mereka sesungguhnya adalah guru yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Merekalah yang seharusnya menanamkan nilai-nilai keutamaan hidup kepada anak-anaknya, bu-

kan malah melepaskan kesempatan itu kepada guru di sekolah. Guru hanyalah fasilitator, menjadi pendamping siswa. Aktor utama dalam proses pembelajaran adalah anak. Mereka ini mahaguru untuk dirinya sendiri," papar Ny. Wahya.

Guru di Sekolah Alam tak hanya mereka yang bekerja sebagai guru di sekolah tersebut. Siapa saja bisa menjadi guru, termasuk orang tua siswa. Sekolah pun tidak melulu dibatasi dinding kelas, tapi bisa di pasar, di sawah atau di rumah siswa secara bergiliran dalam program visiting yang diselenggarakan 1-3 bulan sekali. Proses pembelajaran juga bukan mengedepankan hafalan tapi mengajak siswa belajar sesuatu yang nyata, tidak bersifat khayalan ataupun membual.

Seperti siang itu, Swasono, seorang pemusik, datang ke Sekolah Alam bersama kedua putrinya, Caca dan Nanda. Ia membawa alat musik keyboards, sedangkan Caca menenteng biola. Ia lalu mengajak anak-anak TB menyanyikan sejumlah lagu anak-anak dengan iringan keyboards dan gesekan biola. Anak-anak sontak kegirangan. Mereka naik ke atas meja dan berdendang seturut irama. Tak hanya bernyanyi, Swasono juga meminta anak-anak bercerita tentang pengalaman seputar lagu yang dinyanyikan, Tik, Tik Bunyi Hujan.

Dari kelas TB, Swasono berpindah ke kelas SMP. Ia mengajak siswa di kelas itu berdiskusi tentang berbagai jenis alat musik dan menjelaskan tentang sejarah penciptaan lagu dan penciptanya.

"Pelajaran di Sekolah Alam selalu berlangsung seru. Setiap hari ada riset. Pelajarannya ndak perbidang. Satu topik bisa mencakup semua pelajaran. Seperti waktu SMP dulu, saya belajar bikin sabun cuci. Saya belajar kalau sekian kilogram bahan bisa jadi berapa sabun. Kalau dijual supaya untung, harganya harus berapa. Matematika jadi ndak terasa rumit. Lalu, bahan sabun itu apa saja, gunanya untuk apa," kata Caca.

Caca, dara berusia 16 tahun, adalah lulusan Sekolah Alam. Ia kini melanjutkan ke sekolah konvensional setingkat SMA. Sang adik, Nanda (14

tahun) juga lulusan Sekolah Alam yang kini tengah melanjutkan pendidikan ke sekolah konvensional setingkat SMP.

“Kalau materi di sekolah sekarang, lebih susah. Pelajarannya dipecah-pecah. Semua tergantung guru bagaimana menjelaskannya. Gurunya juga galak. Tapi, saya pengin ngrasain sekolah formal, untuk nambah ilmu,” kata Nanda.

Keterlibatan orang tua dengan berbagai profesi dalam dinamika belajar-mengajar di Sekolah Alam, telah memperluas cakrawala anak-anak peserta didik, yang secara langsung lebih banyak belajar tentang keberagaman. Kehadiran para orang tua juga menjadi bibit tumbuhnya inspirasi dalam benak anak-anak untuk bekal tumbuh sebagai manusia yang merdeka.

Secara status, Sanggar Anak Alam (Sekolah Alam) adalah salah satu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan termasuk dalam kelompok sekolah informal. Bedanya, langkah Salam sejak berdiri pada tahun 2000, seiring dengan gagasan Anies Baswedan sebelum menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ketika ia menggagas Gerakan Indonesia Mengajar yang kini bergulir menjadi Kelas Inspirasi. Ida Tungga

JUARA

III

Febrianti
Koran Tempo

Oasis untuk Anak Pantai

Komunitas Tanah Ombak, Padang, memfasilitasi anak-anak dan remaja untuk membaca, mengarang, menulis puisi, main drama, dan lain-lainnya. Siang yang terik di sebuah rumah di ujung gang yang sempit di Pantai Purus, Padang tidak menghilangkan keceriaan anak-anak dan remaja di dalamnya. Ruangan seluas 100 meter persegi dalam bangunan semi permanen beratap seng dan tanpa langit-langit itu dipenuhi lebih 30 anak yang sedang melakukan berbagai kegiatan: membaca, belajar mengarang, menulis puisi, main drama, mendengarkan dongeng, bahkan ada sedang berlatih membaca naskah untuk film yang sedang mereka garap pada Minggu, 24 Januari lalu.

Saat acara mendongeng, mereka dengan tekun mendengarkan dongeng tentang Hantu Telunjuk yang dibawakan Marwan, seorang guru sebuah SMK di Pariaman yang menjadi voluntir hari itu. Usai dongeng dilanjutkan dengan menceritakan kembali buku yang telah mereka baca selama seminggu yang dipandu sastrawan Yusrizal KW. Ia juga mengajari mereka menulis puisi dan mengarang.

Sementara itu di sudut lain Syuhendri, seniman teater sedang melatih Rio, 12 tahun, berlatih dialog untuk film tentang anak-anak Tanah Ombak yang akan syuting siang hari. Hari itu, ruang baca dan kreativitas Tanah Ombak, sebuah komunitas untuk anak-anak Pantai Purus, Padang mulai membuat film, dan anak-anak yang menjadi bintangnya.

"Anak-anak di sini punya bakat luar biasa, mereka selama ini di-bully lingkungannya, di-bully orang tuanya, karena beratnya kehidupan, banyak sekali persoalan di tempat ini, mereka butuh wadah untuk melepaskan masalah," kata Syuhendri, pendiri komunitas Tanah Ombak. Syuhendri atau dikenal sebagai Hendri Pong adalah pendiri Teater Noktah di Padang. Ia mulai bergerak mendirikan Komunitas Tanah Ombak untuk anak-anak di pantai Purus pada akhir 2013.

"Kebetulan rumah mertua saya sudah empat tahun kosong, karena sudah punya rumah baru, rumah ini juga pernah saya tempati bersama istri pada 1994-2006, jadi sudah cukup akrab dengan warga," kata Syuhendri. Kawasan Pantai Purus itu sebagian besar dihuni nelayan, tetapi di rumah-rumah kontrakan yang sempit juga tempat hunian yang padat, ada bekas napi, penjambret, tempat berjudi. Banyak remaja yang memakai sabu dan menghisap lem.

Menurut Syuhendri orang luar menjuluki gang di sini sebagai gang setan, karena dianggap sarang kriminal dan ditakuti. Dengan kondisi seperti ini anak-anak tidak ada yang memperhatikan, mereka main di luar rumah hingga tengah malam, karena di rumahnya juga bukan tempat yang nyaman.

Pada Desember 2013, Syuhendri mulai merenovasi bangunan, dinding kamar dijebol sehingga mendapat ruangan yang lebih luas, menjadi 100 meter persegi, sampah-sampah di dalam got dibersihkan Syuhendri bersama teman-temannya anggota Teater Noktah. Ia melengkapi dengan buku-buku koleksinya.

"Anak-anak mulai berkumpul karena tertarik dengan hal baru, seperti semut, mereka mengerubungi dan saat ditanya saya katakan sedang buat sanggar, lalu mereka mulai bergabung, awalnya sekitar 15 anak, belajar musik, randai dan teater," katanya. Syuhendri membuka rumah itu 24 jam, dan ada beberapa mahasiswa yang jadi volkuntir untuk mengelola rumah komunitas baru itu. Anak-anak mulai rajin datang, belajar teater malam hari dan tempat itu juga menjadi tempat mereka

bermain serta mengerjakan pekerjaan rumah darisekolah di sini.

“Saya suka di tempat ini, banyak teman. Saya ke sini tiap sore pulang sekolah, baca buku, dan kadang bikin PR,” Kata Fitri Yosi Ferdian Lalu, siswa kelas VI sekolah dasar ini meneruskan kegiatannya melukis yang peralatannya juga disediakan. “Sebelum ada tempat ini, biasanya saya hanya bermain di rumah teman atau ke warnet,” katanya.

Syarat ikut di komunitas ini adalah mau tertib dan tidak berkata kotor. Maklum, anak-anak di situ terbiasa tinggal di lingkungan yang tidak sehat dan biasamengeluarkan kata-kata kotor.

Waktu terus berjalan, anak-anak asuhan Syuhendri kemudian mendapat undangan mengikuti Festival Teater Anak di Taman Ismail Marzuki Jakarta pada awal September 2015. Untuk itu Syuhendri melatih mereka selama empat bulan dan membuatkan naskah Lari ke Bulan untuk mereka. Hasilnya, walaupun tidak pernah tampil di panggung sebelumnya, anak-anak dari komunitas Tanah Ombak meraih penghargaan penampilan terbaik, mengalahkan tim lainnya dari berbagai provinsi di tanah air.

“Lari ke Bulan itu saya tulis dari kisah mereka dan lingkungannya, mereka dibully lingkungan setiap hari, sebagai anak-anak mereka nggak nyaman, kemana mereka pergi? Lari ke Bulan,” kata Syuhendri.

Kemenangan ini penting bagi mereka dan memupuk kepercayaan diri. Bayangkan, Syuhendri melanjutkan, itu pertama kalinya mereka naik pesawat terbang, lalu tampil bersaing dengan anak-anak lain se-Indonesia, di bandara saat bertemu anak-anak dari tim lain mereka sempat diejek dan dibilang katrok oleh anak lain,” kata Syuhendri.

Denyut komunitas semakin terasa saat sastrawan Yusrizal Kw bergabung dengan Syuhendri dan mengelola taman bacaan di Tanah Ombak pada pertengahan September. Yusrizal KW yang sebelumnya mengelola membawa semua buku-bukunya ke komunitas Tanah Ombak. Lebih

1000 buku melengkapi pustaka Tanah Ombak. Kegiatan di komunitas Tanah Ombak dikelola lebih serius. Anak-anak diwajibkan membaca 1 jam sehari dan tiap hari Minggu diadakan pertemuan dan kegiatan bersama seperti belajar mengarang, membuat puisi, mendongeng, teater dan musik. Kegiatan juga dibantu mahasiswa yang menjadi volunter mendampingi anak-anak di Tanah Ombak setiap hari.

“Saya percaya buku akan menyelamatkan mereka, awalnya memang susah mengajarkan mereka membaca buku, tapi sekarang sudah mulai terbiasa, bahkan ada yang sudah bisa membuat puisi,” kata Yusrizal KW. “Kami berharap dari tempat ini bisa menyalurkan cita-cita mereka, dan terhindar dari berbuat kriminal. Pustaka sangat perlu didirikan di perumahan seperti ini.” Sumbangan dari donatur kian melengkapi sarana di komunitas. Ada bantuan berupa buku, alat musik, alat lukis dan perlengkapan lainnya

Saat ini Yusrizal KW dan Syuhendri sedang mengupayakan membuat paket A, B dan C untuk anak-anak yang putus sekolah di kawasan itu. “Yang mengharukan, bapak-bapaknya juga banyak yang mau masuk sekolah paket untuk meningkatkan daya saingnya dalam saat mencari pekerjaan,” kata Yusizal KW.

FEBRIANTI

*" Either write something
worth reading
or do something worth
writing "*

Benjamin Franklin



Perpustakaan
Jenderal